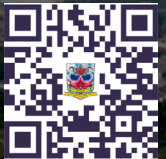





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2022



Jakarta
Sukses Jakarta untuk Indonesia!



**PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
TAHUN 2022**

 **JAKARTA BARAT**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat tahun anggaran 2022 dapat disusun tepat waktu.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun sebagai wujud tanggung jawab Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya membantu Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dibuat secara periodik berisi informasi mengenai capaian kinerja instansi pemerintah atas rencana dan sasaran yang ditetapkan sebelumnya secara transparan dan akuntabel, bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan maupun pelayanan prima kepada masyarakat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) berisi informasi tentang uraian pertanggungjawaban tentang keberhasilan/kegagalan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat tahun 2022 tentang pencapaian tujuan dan sasaran strategis dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi.

Pelaporan kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2022

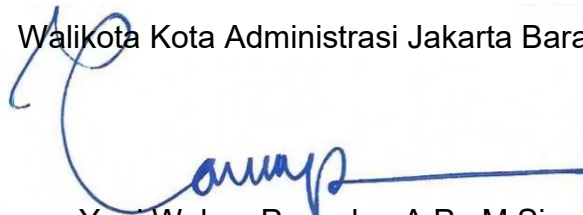
Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Laporan Kinerja.

Dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan dimaksud, Laporan Kinerja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat, diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai kinerja yang telah diwujudkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan secara akurat, relevan, transparan dan akuntabel.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan laporan ini, baik dalam bentuk kontribusi data, kontribusi penulisan, maupun bentuk kontribusi lainnya. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat bagi pengelolaan, penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima kepada masyarakat Jakarta Barat.

Jakarta, 31 Januari 2023

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat,



Yani Wahyu Purwoko, A.P., M.Si
NIP 197302241993111001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai salah satu perangkat daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan unsur pelaksana tugas pemerintahan di wilayah Kota Administrasi yang berkewajiban untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan melaksanakan sebagian tugas pemerintahan daerah yang dilimpahkan dari Gubernur dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas pemerintahan di wilayah Kota Administrasi.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap kedudukan, tugas dan fungsi, disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2022 untuk menggambarkan serta mendorong transparansi capaian kinerja dan prestasi yang berhasil diraih Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat terhadap berbagai sasaran strategis sesuai dengan target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya baik dalam Rencana Strategis, penetapan Indikator Kinerja Utama maupun Perjanjian Kinerja berikut permasalahan dan sejumlah hal yang masih memerlukan perbaikan.

Secara umum Kota Administrasi Jakarta Barat pada tahun 2022 telah menunjukkan kinerja yang baik. Beberapa penghargaan baik tingkat provinsi maupun tingkat nasional berhasil diraih oleh perangkat daerah pada Kota Administrasi Jakarta Barat. Diirumuskan beberapa isu-isu strategis yang berkaitan dengan Kota Administrasi Jakarta Barat.

Rumusan isu-isu strategis dimaksud antara lain isu partisipasi masyarakat, isu ekonomi masyarakat, isu pemberdayaan masyarakat di bidang kepariwisataan, kebudayaan, dan olahraga, isu koordinasi perangkat daerah dan aktor-aktor pembangunan, isu peningkatan kualitas pelayanan, isu penataan dan pengembangan kawasan, isu penagihan kewajiban kepada pemilik SIPPT, dan isu respon pada perangkat wilayah dalam menangani permasalahan di wilayahnya.

Tingkat capaian kinerja sasaran strategis Kota Administrasi Jakarta Barat mencapai 100 % pada setiap indikator kinerja sampai pada tahun 2022. Capaian kinerja sama sebesar 100 % apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya lebih disebabkan peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara Kota Administrasi Jakarta Barat dengan tindak lanjut aduan masyarakat serta merealisasikan capaian kinerja sesuai waktu yang ditetapkan dan melakukan review capaian pada setiap triwulan oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta.

Sekalipun capaian sasaran strategis, kegiatan strategis daerah, sasaran khusus dan sasaran operasional telah masuk dalam kategori memuaskan, namun demikian kerja keras dengan menerapkan nilai-nilai budaya kerja Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kesungguhan, komitmen, inovasi dan kreatifitas serta kapasitas dari seluruh pegawai termasuk koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh perangkat daerah yang ada di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Barat masih perlu ditingkatkan demi tercapainya keserasian dan keselarasan dalam

pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna serta bermanfaat bagi masyarakat Kota Administrasi Jakarta Barat.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	ii
Ikhtisar Eksekutif	iv
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar.....	xiii
Daftar Grafik	xiv
Bab 1 : Pendahuluan.....	15
Latar Belakang	15
Dasar Hukum	16
Gambaran Umum Pemerintah Kota Adm. Jakarta Barat	17
Struktur Organisasi Pemerintah Kota Adm. Jakarta Barat	21
Bab 2 : Perencanaan Kinerja Tahun 2022.....	33
Sasaran Strategis.....	33

Pernyataan Visi	34
Indikator Kinerja Utama	35
Perjanjian Kinerja Tahun 2022	38
Bab 3 : Akuntabilitas Kinerja	46
Capaian Indikator Kinerja	48
Capaian Kegiatan Strategis Daerah	91
Capaian Sasaran Khusus	96
Capaian Sasaran Operasional.....	100
Analisis Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022	104
Perbandingan Capaian Kinerja	119
Realisasi Anggaran Tahun 2022	121
Prestasi / Penghargaan	137
Bab 4 : Penutup	139

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja
2. Realisasi Indikator Kinerja
3. Laporan Penilaian SAKIP dan IRB Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2022
4. Prestasi dan Penghargaan

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Persebaran Penduduk	18
Tabel 2 Persebaran Penduduk	18
Tabel 3 SKPD/UKPD Kota Administrasi Jakarta Barat	28
Tabel 4 Pegawai Kota Administrasi Jakarta Barat menurut jenjang jabatan dan unit kerja	30
Tabel 5 Kesesuaian Pendidikan, Diklatpim dan Pangkat Pejabat Struktural Kota Administrasi Jakarta Barat	31
Tabel 6 Target dan Indikator Kinerja Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2018-2022	36
Tabel 7 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan	37
Tabel 8 Target Kinerja Sasaran Strategis sesuai Lampiran Perjanjian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2022	40
Tabel 9 Target Kinerja KSD Kota Administrasi Jakarta Barat	41
Tabel 10 Target Sasaran Khusus dan Sasaran Operasional Kota Administrasi Jakarta Barat	42
Tabel 11 Program dan Anggaran pada Lampiran Perjanjian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2022	44
Tabel 12 Interpretasi Kategori Nilai Capaian Kinerja	48
Tabel 13 Capaian Indikator Kinerja Utama	49
Tabel 14 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 sampai dengan tahun 2022	50
Tabel 15 Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Program	58

Tabel 16 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2021 dengan Tahun 2022	60
Tabel 17 Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Tahun 2022	63
Tabel 18 Interpretasi Capaian Kinerja Tahun 2022	65
Tabel 19 Jadwal Pelaksanaan SKM	72
Tabel 20 Nilai SKM Pada Kecamatan Kota Adm Jakarta Barat Tahun 2022	79
Tabel 21 Komponen Pengukuran Indikator Kinerja Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	86
Tabel 22 Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	87
Tabel 23 Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kota Adm Jakarta Barat.....	90
Tabel 24 KSD Tahun 2022 Kota Adm Jakarta Barat.....	91
Tabel 25 Capaian Indikator Kinerja KSD tahun 2022.....	92
Tabel 26 Perbandingan Target dan Realisasi KSD Tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.....	94
Tabel 27 Indikator Khusus Tahun 2022 Kota Adm Jakarta Barat	96
Tabel 28 Perbandingan Indikator Khusus Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2022	99
Tabel 29 Indikator Operasional Tahun 2022 Kota Adm Jakarta Barat.....	101
Tabel 30 Perbandingan Indikator Operasional Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2022	102
Tabel 31 Perbandingan Pengukuran Capaian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2022	105
Tabel 32 Tabel Analisis Sumber Daya Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2022	115

Tabel 33 Tabel Perbandingan Nilai IKM Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2022	120
Tabel 34 Realisasi Anggaran Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Kota Administrasi Jakarta Barat.....	122
Tabel 35 Perbandingan Target dan Realisasi Anggaran Perjanjian Kinerja Tahun 2020,2021 dengan Tahun 2022.....	122
Tabel 36 Realisasi anggaran pada SKPD/UKPD Tahun 2022.....	124
Tabel 37 Realisasi pelaksanaan anggaran pada SKPD/UKPD dengan kriteria pada Tahun 2022	129

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat.....	17
Gambar 2 Bagan Susunan Organisasi.....	27

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	31
Grafik 2 Perbandingan Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2022	64



BAB

1 Pendahuluan

Latar Belakang

Pelaksanaan pemerintahan daerah saat ini lebih dituntut pada prinsip-prinsip *good governance* yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Dengan mewujudkan *good governance* melalui peningkatan kinerja aparat negara akan menghasilkan kinerja pelayanan publik yang optimal. *Good governance* merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam menyediakan publik *goods and services* dimana praktek terbaiknya disebut *good governance*.

Agar *good governance* dapat diwujudkan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. *Good governance* menuntut koordinasi yang baik dan profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Instansi Pemerintah memiliki tugas dan fungsi utama memberikan pelayanan kepada masyarakat (publik/stakeholder) Jakarta Barat. Secara periodik pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan hasil atas kinerja yang telah dilaksanakannya selama satu tahun anggaran. Laporan Kinerja disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan

kebijakan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan Kinerja diharapkan juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 selain mengacu kepada peraturan perundang undangan baik dari tingkat pusat maupun tingkat provinsi, juga mengacu kepada Rencana Strategis Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2017-2022.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi.
8. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 53 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022.

Gambaran Umum

Pemerintah Kota Adm. Jakarta Barat

Jakarta Barat terdiri dari 8 Kecamatan, 56 Kelurahan dengan penduduk 2.589.933 jiwa yang menempati areal seluas 12.615,44 ha. Kepadatan penduduk rata-rata di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat adalah 19.993 jiwa/Km² yang tersebar secara tidak merata dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Tambora dengan kepadatan sebesar 44.794 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Kembangan dengan kepadatan penduduk sebesar 13.829 jiwa/km². Keadaan wilayah pada umumnya beriklim panas dengan suhu udara berkisar 23,0 sampai dengan 35,2 derajat Celcius.

Kota Administrasi Jakarta Barat merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata +7 meter di atas permukaan laut. Peta wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat yang terbagi dalam 8 (delapan) kecamatan dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1
Peta Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat

Persebaran Penduduk

Persebaran dan kepadatan penduduk di Kota Administrasi Jakarta Barat sesuai data yang terdapat pada Kota Administrasi Jakarta Barat Dalam Angka 2022 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Persebaran Penduduk

No	Kecamatan	Jumlah Kepala Keluarga	Jumlah Penduduk		
			Laki-laki	Perempuan	Total
1	Kembangan	94.586	145.672	143.096	288.768
2	Kebon Jeruk	114.031	171.433	170.505	341.938
3	Palmerah	74.889	109.905	107.405	217.310
4	Grogol Petamburan	82.010	113.672	114.997	228.669
5	Tambora	92.360	130.913	125.147	256.060
6	Tamansari	45.977	64.818	64.828	129.646
7	Cengkareng	183.019	288.720	280.803	569.523
8	Kalideres	141.409	224.332	218.639	442.971
	Jumlah	828.281	1.249.465	1.225.420	2.474.885

Perekonomian

Sebagai ibukota Negara RI dan pusat pemerintahan, perekonomian Jakarta sangat dipengaruhi oleh kebijakan perekonomian nasional. Selain itu, sebagai kota yang terbuka, perekonomian Kota Jakarta tidak terkecuali Kota Administrasi Jakarta Barat juga dipengaruhi oleh kondisi dan dinamika perekonomian internasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Administrasi Jakarta Barat, laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 yang tumbuh +0.84 persen dikarenakan kondisi pemulihan

ekonomi paska transisi penanganan covid 19 yang sangat berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi.

Faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi perekonomian Jakarta khususnya Jakarta Barat adalah kondisi penyebaran kasus Covid 19, jumlah penduduk, pengembangan infrastruktur kota yang meliputi penataan kawasan dan pemukiman, kebijakan pemerintah daerah, dan iklim ketentraman dan ketertiban yang kondusif yang sangat mempengaruhi iklim berusaha, kelancaran aktivitas ekonomi dan kepariwisataan.

Sosial Budaya

Tantangan yang muncul di bidang sosial, adalah pemenuhan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang mudah mengakses dan diakses masyarakat, ancaman rawan pangan dan penyebaran pandemi Covid 19, serta bertambahnya jumlah penduduk dan pengangguran. Adapun data jumlah penduduk berdasarkan agama yang dianut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2
Data Penduduk Menurut Agama

No	Kecamatan	Pemeluk Agama					
		Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
1	Kembangan	236.539	29.884	23.515	628	7.219	52
2	Kebon Jeruk	284.187	33.432	24.864	452	14.676	134
3	Palmerah	206.278	14.069	8.120	566	2.821	28
4	Grogol Petamburan	139.287	37.742	26.667	313	36.767	179
5	Tambora	167.624	31.538	12.726	81	62.969	148
6	Tamansari	75.936	21.011	10.827	87	22.157	31
7	Cengkareng	453.920	56.008	22.860	452	31.480	106
8	Kalideres	352.475	41.515	18.556	235	25.879	117
	Jumlah	1.916.246	265.199	148.135	2.814	203.968	795

Struktur Organisasi

Pemerintah Kota Adm. Jakarta Barat

Kota Administrasi Jakarta Barat merupakan salah satu perangkat daerah yang ada pada Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Kedudukan Kota Administrasi sebagai perangkat daerah diatur dalam Pasal 2 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi, yang menyebutkan sebagai berikut :

1. Kota Administrasi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
2. Kota Administrasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah.

Secara umum Kota Administrasi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum diwilayahnya, mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat diwilayahnya, membina kecamatan dan kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Gubernur. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut Kota Administrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi;
- b. Pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi;

- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum diwilayahnya;
- d. Pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan masyarakat diwilayahnya;
- e. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- g. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana sarana pelayanan umum;
- h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kecamatan dan kelurahan;
- i. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh UKPD di tingkat Kota Administrasi;
- j. Pengoordinasian, penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan operasional pelaksanaan tugas pemerintahan di wilayah Kota Administrasi;
- k. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal;
- l. Pemantauan dan pemetaan situasi dan kondisi wilayah Kota Administrasi;
- m. Pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah tingkat wilayah Kota Administrasi;
- n. Pelaksanaan koordinasi dengan Dewan Kota;
- o. Pengelolaan hukum, ketatalaksanaan, pelayanan publik,

kepegawaian, ketatausahaan, keprotokolan, kerumahtanggaan, barang/aset dan keuangan Kota Administrasi;

- p. Fasilitasi pengkoordinasian dan pelaksanaan penagihan atas kewajiban pengembang yang tertuang dalam Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah/Surat Izin Pemanfaatan Ruang berkoordinasi dengan PD/UKPD;
- q. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Administrasi; dan
- r. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi, susunan organisasi Kota Administrasi Jakarta Barat terdiri atas :

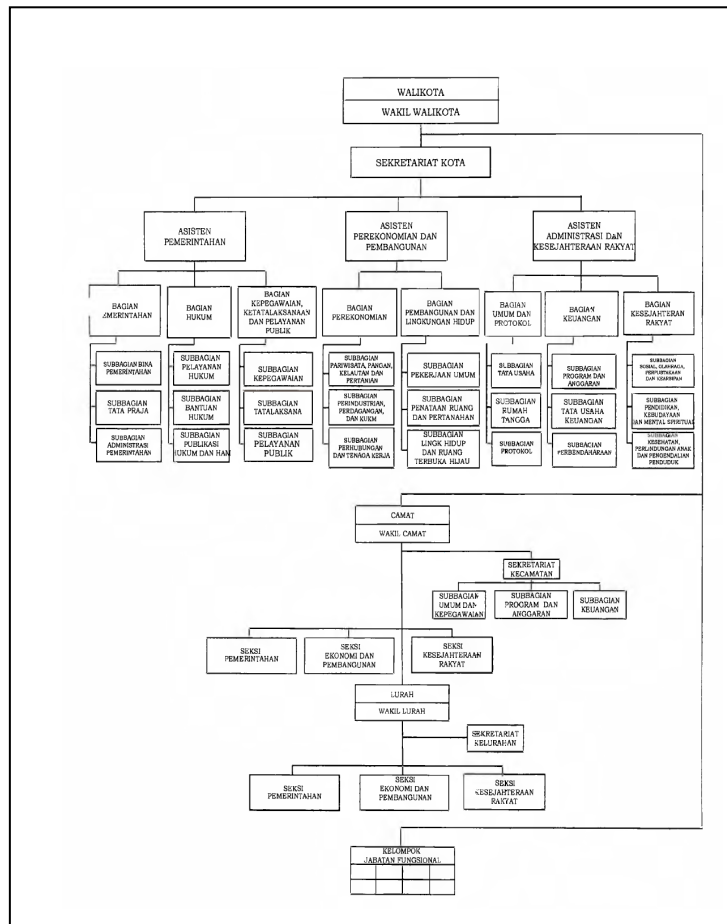
- a. Sekretariat Kota, terdiri atas :
 - 1. Asisten Pemerintahan, terdiri atas :
 - a) Bagian Tata Pemerintahan, terdiri atas :
 - 1) Subbagian Bina Pemerintahan;
 - 2) Subbagian Tata Praja; dan
 - 3) Subbagian Administrasi Pemerintahan.
 - b) Bagian Hukum, terdiri atas :
 - 1) Subbagian Pelayanan Hukum;

- 2) Subbagian Bantuan Hukum; dan
 - 3) Subbagian Publikasi Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- c) Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik, terdiri atas :
- 1) Subbagian Kepegawaian;
 - 2) Subbagian Tatalaksana; dan
 - 3) Subbagian Pelayanan Publik.
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas :
- a) Bagian Perekonomian, terdiri atas :
- 1) Subbagian Pariwisata, Pangan, Kelautan dan Pertanian;
 - 2) Subbagian Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
 - 3) Subbagian Perhubungan dan Tenaga Kerja.
- b) Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup, terdiri atas :
- 1) Subbagian Pekerjaan Umum;
 - 2) Subbagian Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan; dan

- 3) Subbagian Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau.
3. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas :
- a) Bagian Umum dan Protokol, terdiri atas :
 - 1) Subbagian Tata Usaha;
 - 2) Subbagian Rumah Tangga; dan
 - 3) Subbagian Protokol.
 - b) Bagian Keuangan, terdiri atas :
 - 1) Subbagian Program dan Anggaran;
 - 2) Subbagian Tata Usaha Keuangan; dan
 - 3) Subbagian Perbendaharaan.
 - c) Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas :
 - 1) Subbagian Sosial, Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan;
 - 2) Subbagian Pendidikan, Kebudayaan dan Mental Spiritual; dan
 - 3) Subbagian Kesehatan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk.

- b. Kecamatan, terdiri atas :
 - 1. Sekretariat Kecamatan, terdiri atas :
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Subbagian Program dan Anggaran; dan
 - c) Subbagian Keuangan.
 - 2. Seksi Pemerintahan;
 - 3. Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
 - 4. Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
 - 5. Kelurahan, terdiri atas :
 - a) Sekretariat Kelurahan;
 - b) Seksi Pemerintahan;
 - c) Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
 - d) Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan organisasi tersebut dalam Lampiran Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi, digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2
Bagan Susunan Organisasi

Adapun UKPD di tingkat Kota Administrasi, yang berkaitan dengan fungsi Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan oleh Kota Administrasi, terdiri atas :

- Inspektorat Pembantu Kota Administrasi;
- Suku Dinas;
- Suku Badan;
- Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi; dan
- Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi.

Tabel 4
SKPD/UKPD Kota Administrasi Jakarta Barat

NO	INSTANSI	PIMPINAN SKPD
1	Asisten Pemerintahan	Firmanudin
2	Asisten Administrasi dan Kesra	RM. Amien Haji
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Imron
4	Bagian Pemerintahan Setko Adm. Jakarta Barat	Rano Rahmat Efendi
5	Bagian Hukum Setko Adm. Jakarta Barat	Zeri Ronazy
6	Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Adm. Jakarta Barat	Budiono Santoso
7	Bagian PLH Setko Adm. Jakarta Barat	Ziki Zulkarnain
8	Bagian Kesra Setko Adm. Jakarta Barat	Abdurrahman Anwar
9	Bagian Keuangan Setko Adm. Jakarta Barat	Suci Handayani
10	Bagian Umum dan Protokol Setko Adm. Jakarta Barat	PLT. RM. Amien Haji
11	Bagian Perekonomian Setko Adm. Jakarta Barat	Holi Susanto
12	Inspektur Pembantu Wilayah Kota	Dzikran kurniawan
13	Kepala Satpol PP Jakarta Barat	Agus Irwanto
14	Suku Badan Kesatuan Bangsa & Politik	M. Matsani
15	Suku Badan Kepegawaian Kota	Moh. Hafiz
16	Suku Badan Pendapatan Daerah	Adhi Wirananda
17	Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota	Achmad Ichsan T
18	Suku Badan Pengelola Aset Daerah	Syahrul Hidayat
19	Suku Badan Pengelola Keuangan Daerah	Ihar Sugiharti
20	Unit Pengelola Barang & Jasa	Aulia
21	Suku Dinas Kependudukan & Catatan Sipil	Gentina Arifin
22	Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Adm. Jakarta Barat	Jon Vendri
23	Suku Dinas Kominfo, Informatika dan Statistik	Vigilius Christian A
24	Suku Dinas Perhubungan	Muslim

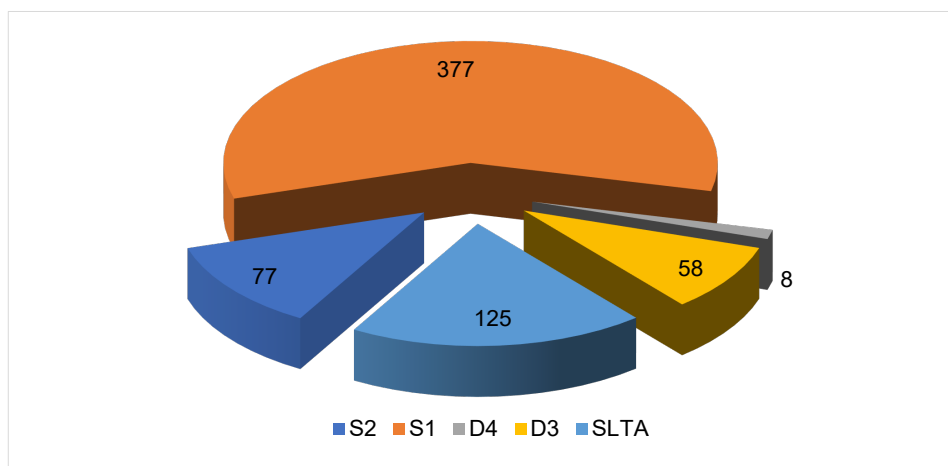
NO	INSTANSI	PIMPINAN SKPD
25	Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	Jackson Dianrus S
27	Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Keratif Kota Adm. Jakarta Barat	Sonti Pangaribuan
28	Suku Dinas Bina Marga	Darwin Ali
29	Suku Dinas Sumber Daya Air	Purwanti Suryandari
30	Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Agus Ruhiyat
31	Suku Dinas Lingkungan Hidup	Slamet Riyadi
32	Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang & Pertanahan	Bayu Aji
33	Suku Dinas Sosial	Suprpto
34	Suku Dinas Pendidikan Wilayah I	Aroman
35	Suku Dinas Pendidikan Wilayah II	Junaedi
36	Suku Dinas Kesehatan	Kristy Wathini
37	Suku Dinas Pemuda & Olah Raga	Tedy Cahyono
38	Suku Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Sikah Winarni
39	Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	Djauhar Arifien
40	Suku Dinas Perpustakaan & Arsip	Achmad Jazuri
41	Unit Pelaksana PMPTSP	Aziz Kurniawan Saputro

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kota Administrasi Jakarta Barat didukung oleh sebanyak 605 pegawai yang tersebar kedalam tingkat Sekretariat Kota, Kecamatan dan Kelurahan, dengan komposisi berdasarkan jenjang jabatan dan unit kerja sebagai berikut :

Tabel 4
Pegawai Kota Administrasi Jakarta Barat
menurut jenjang jabatan dan unit kerja

NO	JABATAN	SETKO	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH
1	Pimpinan Tinggi Pratama	2	0	0	2
2	Administrator	10	21	0	31
3	Pengawas	6	47	260	313
4	Sub Koordinator	16	0	0	16
5	Fungsional	2	0	0	2
6	Pelaksana	68	26	147	241
	TOTAL	104	94	407	605

Dalam rangka peningkatan kinerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia Kota Administrasi Jakarta Barat perlu dilakukan terutama bagi para pegawai yang dipercaya untuk menduduki jabatan struktural. Penyesuaian tingkat pendidikan para pejabat struktural pada jenjang pengawas dan administrator telah dilakukan pengisian jabatan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Aparatur Sipil Negara, dimana salah satu persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan pengawas adalah memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah Diploma 3. Kualifikasi pendidikan pejabat struktural Kota Administrasi Jakarta Barat sesuai data pada tahun 2022 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Grafik 1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi pejabat struktural tidak hanya dari segi pendidikan formal mengingat masih terdapat pejabat struktural yang belum memenuhi persyaratan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5
Kesesuaian Pendidikan, Diklatpim dan Pangkat
Pejabat Struktural Kota Administrasi Jakarta Barat

NO	KELOMPOK JABATAN	JUMLAH JABATAN	KESESUAIAN		
			PENDIDIKAN	DIKLATPIM/ DIKLAT Fungsional	PANGKAT
1	PIMPINAN TINGGI PRATAMA	2	2	0	2
2	ADMINISTRATOR	31	31	19	31
3	PENGAWAS	313	292	117	306
4	SUBKOORDINATOR	16	16	13	16
	TOTAL	362	341	149	355





BAB 2 Perencanaan Kinerja Tahun 2022

Sasaran Strategis

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat senantiasa mengacu pada visi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan semua.

Untuk mewujudkan visi Kota Jakarta khususnya di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat melalui Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 53 Tahun 2018 telah ditetapkan Rencana Strategis Tahun 2017-2022 yang antara lain berisi tujuan dan sasaran strategis yang akan ditempuh dalam kurun waktu lima tahun ke depan sekaligus sebagai panduan/acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi. Renstra tersebut lebih lanjut dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada tahun berjalan.

Pernyataan Visi

Sebagai pemberi arah dalam melaksanakan kegiatan di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Barat, perlu ditetapkan bersama suatu pandangan ke depan (*vision*) yang akan menjadi sumber motivasi dan inovasi dinamis dalam mewujudkan berbagai bentuk pelayanan publik yang prima. Gambaran ke depan yang dimaksud dirumuskan dalam bentuk visi, misi, tujuan dan sasaran Kota Administrasi Jakarta Barat.

Visi Kota Administrasi Jakarta Barat adalah :

“Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Kota Jasa yang nyaman dan Sejahtera”

Dalam rangka mewujudkan kondisi ideal tersebut, maka dirumuskan sebanyak 4 (empat) Misi sebagai hal-hal yang harus terlaksana dalam mencapai Visi Kota Administrasi Jakarta Barat, yaitu:

1. Membangun Tata Pemerintahan yang baik guna terwujudnya sebagai sebagai kota jasa dan wisata budaya dan bersejarah.
2. Meningkatkan Kualitas lingkungan perkotaan yang berkelanjutan.
3. Memberdayakan Masyarakat dengan mengembangkan nilai, norma serta pranata sosial.
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat.

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari visi dan misi tersebut adalah "Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kota Administrasi Jakarta Barat" sehingga tujuan Kota Administrasi Jakarta Barat kurun waktu tahun 2018-2022 "Terwujudnya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat untuk Menciptakan Jakarta Sebagai Kota Maju, Lestari dan Berbudaya yang Warganya Terlibat dalam Mewujudkan Keberadaban dan Kesejahteraan bagi Semua" dapat terwujud. Pada Visi dan Misi Kota Administrasi Jakarta Barat merupakan penunjang dukungan pada pembangunan berkelanjutan pada periode ke 5 tahun 2022 sesuai dengan pernyataan visi dan misi Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan menselaraskan pada rencana renstra 2018-2022 yang telah disepakati.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Ukuran keberhasilan atau kegagalan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kota Administrasi Jakarta Barat akan diukur melalui terwujudnya atau tidaknya target Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dengan keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 152 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2018-2022.

Secara terperinci target kinerja Indikator Kinerja Utama Kota Administrasi Jakarta Barat yang akan dicapai pada setiap tahun antara tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 6
Target dan Indikator Kinerja Kota Administrasi Jakarta Barat
Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan (Termasuk di Kelurahan)	80	83	86	88	88,5

Sasaran strategis Walikota Jakarta Barat merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan berikut dengan indikator kinerja dari program dan kegiatan.

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat pencapaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Kinerja penyelenggaraan urusan bertujuan untuk menggambarkan kinerja pelayanan Kota Administrasi Jakarta Barat yang mengemban urusan pemerintahan umum sesuai pembagian bidang urusan dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Penjabaran lebih lanjut dari tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama kedalam program dan indikator kinerja program terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Program peningkatan dan pengelolaan Kantor Kota Administrasi Jakarta Barat	Indeks kepuasan pelayanan kantor	4 Index	4 Index	4 Index	4 Index	4 Index
Program pengelolaan kendaraan operasional Kota Administrasi Jakarta Barat	Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	4 Index	4 Index	4 Index	4 Index	4 Index
Program Peningkatan penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Barat	Persentase Penanganan Perkara tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat	0	100	100	100	100
	Persentase Terbinanya Lembaga Kemasyarakatan	0	20	40	60	80
	Persentase Penyelesaian Sengketa Hukum	0	100	100	100	100
	Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia	0	94	95	96	97
	Persentase Capaian Kinerja Walikota (KPI, Perkin dan Lakip)	0	100	100	100	100
	Persentase Jumlah Wirausaha Baru Yang Tercapai	0	100	100	100	100
	Jumlah Kawasan yang Tertata	0	1	1	1	1
	Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan	0	4 Index	4 Index	4 Index	4 Index
	Koordinasi Pelaksanaan Kota Sehat	0	100	100	100	100
	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota	0	100	100	100	100
	Koordinasi Pelaksanaan Kota Layak Anak	0	100	100	100	100
	Koordinasi pelaksanaan BOP dan BOS	0	100	100	100	100
	Persentase	0	85	86	87	88

Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi Jakarta					
Program peningkatan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	0	90	91	92	93
	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	0	90	91	92	93
Program peningkatan pengembangan kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Barat	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Kelurahan, Kecamatan dan Kota/Kabupaten Administrasi	0	4 Index	4 Index	4 Index	4 Index
	Jumlah Kantor Lurah/Rumah Dinas dan Sarana Perlengkapannya yang memenuhi standar	0	53	64	72	76
	Jumlah Kantor Camat/Rumah Dinas dan Sarana Perlengkapannya yang memenuhi standar	0	6	11	11	11
Program Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Barat	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kota Administrasi	85	0	0	0	0
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	80	0	0	0	0

Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian kinerja pada dasarnya merupakan penugasan pimpinan untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan sasaran, indikator dan target kinerja. Perjanjian kinerja

merepresentasikan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Melalui penetapan perjanjian kinerja, peningkatan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur diharapkan dapat tercapai karena tersedia kejelasan ukuran penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Berdasarkan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022, para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diwajibkan untuk melaksanakan penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022. Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah disusun dengan ketentuan menggunakan sasaran strategis dan indikator kinerja utama Eselon II atau kondisi yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan.

Sebagai tindak lanjut Instruksi Gubernur dimaksud, telah dilakukan penandatanganan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Kota Administrasi Jakarta Barat antara Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat dengan Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2022 bertempat di Ruang Rapat Sekda Balaikota Jakarta. Dengan demikian, telah terdapat dokumen resmi yang berisi sasaran, indikator dan target kinerja yang menjadi tolok ukur evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment).

Sasaran, indikator dan target kinerja yang tertuang dalam lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Kota Administrasi Jakarta Barat, meliputi :

Tabel 8
Target Kinerja Sasaran Strategis
sesuai Lampiran Perjanjian Kinerja
Kota Administrasi Jakarta Barat
Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	Indeks Reformasi Birokrasi	91
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Kota Administrasi Jakarta Barat	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan	88,5
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	91%

Target kinerja pada Perjanjian Kinerja 2022 pada sasaran strategis terdapat Kegiatan Strategis Daerah 2022 dalam pelaksanaan sebagaimana tercantum mewajibkan tercapainya target pada setiap triwulan. Adapun Kegiatan Strategis Daerah 2022 sebagai berikut :

Tabel 9
Target Kinerja KSD
Kota Administrasi Jakarta Barat
Tahun 2022

NO	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Target	Keterangan
Kegiatan Strategis Daerah 2022						
1	Meningkatnya kewirausahaan baru	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (nomor 20)	e-Monev KSD	100%	Persentase
NO	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Target	Keterangan
2	Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/ Situ/ Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai	1	Inventarisasi lahan di atas sistem drainase perkotaan di DKI Jakarta Sosialisasi rencana penataan area sempadan dan trace Mediasi apabila terdapat permasalahan (nomor 23)	e-Monev KSD	100%	Persentase
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (nomor 39)	e-Monev KSD	100%	Persentase
4	Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat (nomor 45)	e-Monev KSD	100%	Persentase

5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (nomor 61)	e-Monev KSD	100%	Persentase
6	Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Penguatan Peran Walikota/ Bupati dalam penataan kawasan (nomor 66)	e-Monev KSD	100%	Persentase
7	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian (nomor 73)	e-Monev KSD	100%	Persentase

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 terdapat pelaksanaan Sasaran Khusus dan Sasaran Operasional dalam pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah yang mempengaruhi pada capaian Kinerja Perangkat Daerah dan penerimaan penghasilan bila tidak tercapai capaian target yang telah ditetapkan. Sasaran yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 10
Target Sasaran Khusus dan Sasaran Operasional
Kota Administrasi Jakarta Barat
Tahun 2022

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Target	Keterangan
Sasaran Khusus						
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Opini laporan keuangan daerah	e-Kinerja	3	WTP
2	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Kinerja	100%	Persentase

3	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program unggulan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	e-Kinerja	100%	Persentase
4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022	e-Kinerja	AA (91)	Predikat
5	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	1	Nilai PMPRB Perangkat Daerah Tahun 2022	e-Kinerja	95	Nilai
6	Peningkatan penggunaan e-Office dalam kegiatan administrasi persuratan	1	Jumlah Surat atau Nota Dinas masuk ke akun Seluruh SKPD yang terproses / terdisposisi	7	100%	Persentase
7	Peningkatan penggunaan e-Produk hukum	1	Jumlah perbal/produk hukum yang dibuat melalui sistem e-perbal	e-Kinerja	100%	Persentase

Sasaran Operasional

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Target	Keterangan
8	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	100%	Persentase
9	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	100%	Persentase
10	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	100%	Persentase

Target kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2022 tersebut di atas, diwujudkan melalui penyelenggaraan beberapa program dengan alokasi anggaran sebagai berikut :

Tabel 11
Program dan Anggaran pada Lampiran Perjanjian Kinerja
Kota Administrasi Jakarta Barat
Tahun 2022

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Pengelolaan Kecamatan	512.932.993.906	APBD Provinsi DKI Jakarta
2	Program Pengelolaan Kota Administrasi	13.740.812.391	APBD Provinsi DKI Jakarta
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	375.956.239.661	APBD Provinsi DKI Jakarta
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	70.475.724.657	APBD Provinsi DKI Jakarta
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah	2.788.038.904	APBD Provinsi DKI Jakarta
6	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	APBD Provinsi DKI Jakarta



BAB

3

Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat di dalam Bab 3 ini akan menyajikan akuntabilitas kinerja yang meliputi capaian kinerja Indikator Kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat dengan uraian capaian masing-masing sarannya. Laporan ini akan memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022.

1. Metode Pengukuran Kinerja

Dalam Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Mengacu pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 IX/6/8/2003 Tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pembandingan kinerja yang (seharusnya) terjadi

atau realisasi dengan kinerja yang diharapkan atau target dilakukan dengan memperhatikan karakteristik komponen realisasi. Karakteristik komponen realisasi tersebut dibedakan menjadi :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik; dan
2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja.

Mencermati Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Kota Administrasi Jakarta Barat dimana seluruh target indikator kinerja memiliki karakteristik semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja maka dalam pengukuran capaian kinerja rumus yang digunakan adalah :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Metode Penyimpulan Capaian Sasaran

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dilakukan penyimpulan capaian kinerja organisasi secara keseluruhan dan capaian masing-masing sasaran strategis. Capaian kinerja organisasi merupakan nilai rata-rata dari seluruh capaian sasaran strategis. Penyimpulan dilakukan dengan memberi interpretasi atau makna atas nilai rata-rata yang diperoleh. Makna dari nilai tersebut diambil dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25

Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang dapat digambarkan dalam Tabel di bawah ini :

Tabel 12
Interpretasi Kategori Nilai Capaian Kinerja

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi	Kode
1	AA	>85 - 100	Memuaskan	
2	A	> 75 - 85	Sangat Baik	
3	B	> 65 - 75	Baik	
4	CC	> 50 - 65	Cukup	
5	C	> 30 - 50	Kurang	
6	D	0 - 30	Sangat kurang	

Capaian Indikator Kinerja

1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Sebagai alat untuk mengukur kinerja yang hasilnya dapat dipergunakan untuk melihat aspek-aspek yang harus diperbaiki dalam rangka peningkatan kinerja berikut akuntabilitasnya, setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama. Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi tercermin dari terwujud atau tidaknya dampak yang diharapkan dari pelaksanaan program dan kegiatan. Terwujud atau tidaknya dampak yang diharapkan tercermin pencapaian target indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 152

Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2018-2022,

Hasil pengukuran untuk tahun 2022 yang merupakan tahun keempat periode Rencana Strategis 2017-2022 atas pencapaian target indikator kinerja utama Kota Administrasi Jakarta Barat serta perbandingannya dengan target akhir yang diharapkan, menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 13
Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Kota Administrasi Jakarta Barat	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan (termasuk di Kelurahan)	88,50	93,59	105,75%

Berdasarkan tabel tersebut dimana nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2022 mencapai angka 93,59 telah memberi kontribusi yang sangat baik bagi pencapaian target Rencana Strategis 2017-2022 karena telah berhasil mencapai 105,75% dari target kinerja yang diharapkan dapat terwujud pada akhir periode Rencana Strategis.

Perbandingan realisasi, target dan capaian indikator kinerja utama yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan (termasuk di Kelurahan) dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 14
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Tahun 2018 sampai dengan tahun 2022

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1	2019	83	84,06	101,28%
2	2020	86	88,01	102,34%
3	2021	88	90,62	102,98%
4	2022	88,5	93,59	105,75%

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, realisasi indikator kinerja utama yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan (termasuk di Kelurahan) yang angkanya diperoleh berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat, senantiasa diharapkan berhasil mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara umum masyarakat Kota Administrasi Jakarta Barat telah puas dengan pelayanan kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh jajaran Kota Administrasi Jakarta Barat terutama kecamatan dan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan PPSU dan Ketertiban Umum. Terkait pelaksanaan survei pada Posyandu, PKK, Jumantik, dan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) telah disepakati dilaksanakan dengan kegiatan capaian pada triwulan IV pada Tahun 2022.

Beberapa faktor penunjang yang memungkinkan tercapainya target indikator kinerja utama, antara lain :

1. Dukungan masyarakat dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan yang dilaksanakan aparat kecamatan dan kelurahan.
2. Kinerja yang baik dari para Camat dan Lurah beserta seluruh jajarannya dalam memberikan layanan kemasyarakatan.
3. Koordinasi dan kerja sama yang baik dari unit/instansi terkait.
4. Penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan survei yang memberi kemudahan bagi responden.
5. Kegiatan implementasi percepatan penanganan kondisi pandemi Covid-19 pada PPKM di Kota Administrasi Jakarta Barat, antara lain :
 - a) Tahap Pencegahan :
 - 1) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - 2) Pembentukan Posko Penanganan Covid-19 di Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - 3) Menyediakan alat pengukur suhu di Instansi Pemerintah, Swasta, Fasilitas Publik dan Destinasi Wisata;
 - 4) Membuat video tentang tata cara pembuatan disinfektan sederhana;
 - 5) Membuat seruan Bersama 3 pilar Forkopimko (Walikota, Dandim dan Kapolres) terkait pencegahan dan penanganan Covid-19;
 - 6) Rapat koordinasi dalam rangka Gugus Tugas terkait penanganan Covid-19 dan Pelaksanaan Desinfeksi massal di Kota Tua;
 - 7) Menyediakan sarana cuci tangan di seluruh kantor Pemerintah dan Swasta;

- 8) Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Pencegahan Covid-19;
- 9) Melaksanakan monitoring Pelaksanaan Pembelajaran Di Rumah;
- 10) Melaksanakan pengawasan perilaku siswa didik selama belajar dirumah;
- 11) Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat untuk menghindari keramaian;
- 12) Melaksanakan penjagaan destinasi wisata dan RPTRA dari pengunjung serta melaksanakan SOP di tempat Keramaian;
- 13) Menunda pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB);
- 14) Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait penghapusan Ganjil Genap dan koordinasi kepada unsur terkait;
- 15) Melaksanakan sosialisasi pemotongan rute kepada masyarakat terkait Pengurangan armada Transjakarta dan Mass Rapid Transit Jakarta (MRT);
- 16) Melaksanakan pengaturan Jumlah penumpang dan antrian di halte;
- 17) Melaksanakan sosialisasi dan pengawasan kepada masyarakat, kantor pemerintah dan swasta terkait pengaturan jarak antrian;
- 18) Melaksanakan monitoring pasar dan stok logistik;
- 19) Melaksanakan koordinasi kegiatan Operasi Pasar dengan Bulog dan PD Pasar Jaya;
- 20) Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat agar warga tidak pulang kampung;

- 21) Menyiapkan Prosedur dan monitoring pelaksanaan Work From Home (WFH) bagi karyawan;
- 22) Melakukan pembersihan tempat ibadah dengan desinfektan;
- 23) Menghimbau masjid tidak menggunakan karpet untuk sementara;
- 24) Menghimbau masjid dan tempat ibadah lainnya untuk tidak melaksanakan kegiatan peribadatan sesuai Surat Seruan Gubernur Nomor 5 Tahun 2020;
- 25) Membangun hotline bagi warga di wilayah masing2 kecamatan;
- 26) Mempersiapkan usulan lokasi alternative karantina di wilayah Jakarta Barat dan melaksanakan kerja bakti massal dan penyemprotan desinfeksi di lokasi usulan karantina serta membuat kajian dampak sosial masyarakat;
- 27) Mengusulkan sarana prasarana medis dan non medis;
- 28) Melaksanakan himbauan langsung kepada masyarakat melalui mobil keliling untuk tetap berada dirumah atau menghindari keramaian.
- 29) Melaksanakan himbauan langsung kepada masyarakat melalui mobil keliling untuk tetap berada dirumah atau menghindari keramaian;
- 30) Melakukan penyemprotan desinfeksi menggunakan alat desinfektan dan Mobil Pemadam Kebakaran ke kampung-kampung disinfektan secara mandiri dan swadaya;
- 31) Melaksanakan sosialisasi dan rapat jarak jauh (Teleconference) di Posko Penanggulangan Covid-19;

- 32) Menghimbau Kantor Urusan Agama (KUA) utk menunda pelaksanaan akad nikah, jika terpaksa akad nikah dilakukan di Kantor KUA saja, yg dihadiri hanya beberapa orang dan mematuhi protokol kesehatan (cuci tangan, jaga jarak, bersalaman tidak bersentuhan, memakai sarung tangan);
- 33) Melaksanakan rapat teknis persiapan pelaksanaan isolasi mandiri RW bersih dan terkait perlindungan dan pencegahan penularan pada masyarakat yang memiliki resiko tinggi kepada Camat dan Lurah;
- 34) Melaksanakan Karantina / Isolasi RW secara mandiri dan monitoring;
- 35) Memberikan perlindungan dan pencegahan penularan pada masyarakat yang memiliki resiko tinggi bekerja sama dg PKK, Dasawisma dan RT;
- 36) Pembentukan Gugus Tugas Tingkat Kecamatan, Kelurahan dan RW.

b) Tahap Penanganan/ Pengobatan :

- 1) Membantu petugas Puskesmas dalam rangka melakukan pemeriksaan di rumah Orang Dalam Pemantauan (ODP);
- 2) Kegiatan pemutusan rantai penularan (tracing contact) covid-19 lewat investigasi kasus/ Penyelidikan epidemiologi bekerjasama dengan RS sejakarta Barat, dan fasyankes primer (puskesmas);
- 3) Penyusunan menu TKTP untuk ODP/PDP;
- 4) Membina jaringan dengan RS Swasta agar data pasien tidak lolos;

- 5) Melakukan pengawasan karantina rumah bagi para pasien terdampak Covid 19;
- 6) Melakukan pemeriksaan rapid test Covid-19;
- 7) Melakukan update kasus setiap hari;
- 8) Membuat Tim Gerak Cepat Kesehatan;
- 9) Pengaktifan Pemantauan Kepatuhan ODP/ PDP yang melakukan karantina Rumah oleh 3 unsur :
 - Unsur 1 : Sudinkes dan Puskesmas
 - Unsur 2 : Camat/ Lurah
 - Unsur 3 : Pihak berwajib
- 10) Melakukan tracing kontak erat yang telah berkontak dengan para pasien positif covid;
- 11) Laporan Harian jumlah ODP/ PDP/ Kasus Positif/ Meninggal kepada Gugus Tugas Covid19 Jakarta Barat;
- 12) Distribusi VTM dan RDT kepada fasyankes Primer dan lanjutan (RSUD dan RS Swasta);
- 13) Komunikasi Cepat (Notifikasi Kasus) kepada lintas Dinas Kesehatan (Provinsi Banten, kota/ Kab Bekasi, kota/ Kab Bogor);
- 14) Membantu petugas Sudin Sosial utk menyalurkan bantuan makan kepada ODP yg sdg diisolasi di rumah;
- 15) Membagikan masker kepada tim kesehatan;
- 16) Memberikan bantuan disinfektan, masker kepada Petugas dan PPSU;
- 17) Menyerahkan bantuan makanan untuk petugas puskesmas;

- 18) Melaksanakan monitoring dan pengawasan ke Masjid terkait pelaksanaan terhadap Jamaah pada Rumah Ibadah;
- 19) Melaksanakan pemeriksaan/Rapid Test pada Rumah Ibadah oleh unsur Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat;
- 20) Mengevakuasi Jamaah yang Positif dan 39 Orang Jamaah Masjid Kebon Jeruk yang Kategori ODP ke RS Darurat Wisma Atlet Kemayoran;
- 21) Melaksanakan Pengamanan di Lokasi Isolasi Masjid yang terdampak Covid 19;
- 22) Penyediaan kebutuhan makan dan minum 3 kali sehari di lokasi isolasi selama pelaksanaan isolasi;
- 23) Melaksanakan pemantauan dan pengecekan kesehatan setiap hari ;
- 24) Memberikan Alat Pelindung Diri (APD) yg diperoleh dari swadaya kepada petugas pemakaman;
- 25) Membantu mengirimkan makanan ke Posko Gugus Tugas Covid-19 Tingkat Kota Jakarta Barat;
- 26) Menghimpun dan menyalurkan sembako bersama Forkopimko terhadap masyarakat yang membutuhkan;
- 27) Penggalangan dana dan bantuan untuk disalurkan kepada para tim medis dan masyarakat.
- 28) Melakukan patroli malam melibatkan unsur kewilayahan dan 4 Pilar pada Kelurahan, Kecamatan dan Kota Administrasi Jakarta Barat;

c) Tahap Pemulihan :

- 1) Melaksanakan Kerjabakti dan melaksanakan disinfeksi di lingkungan tempat tinggal warga pasien covid;
- 2) Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat yang terdampak Covid-19;
- 3) Melakukan stickerisasi lokasi rumah yang terdampak dan melakukan pendampingan penelusuran lebih lanjut.

Dari data perkembangan terlihat bahwa harapan capaian pada tahun 2022 mengalami kenaikan angka pencapaian Indikator Kinerja Utama dibandingkan dengan yang pernah diraih pada tahun 2021. Hasil evaluasi mencatat beberapa faktor yang menjadi potensi penghambat dalam upaya mengejar angka capaian ini selama tahun 2022, yaitu :

1. Perubahan anggaran pada Rancangan Perubahan sehingga terdapat beberapa kegiatan yang anggarannya dimatikan.
2. Terjadinya transisi pemulihan paska penanganan covid 19 yang masih berstatus transisi menuju endemi.

Upaya mewujudkan sasaran strategis meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kota Administrasi Jakarta Barat pada Tahun 2022 dilakukan melalui pelaksanaan berbagai program. Target, realisasi dan capaian dari masing-masing indikator kinerja program dengan sumber data pada pengolahan Akuntabilitas Pemerintah dimaksud dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 15
Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Program

1	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN	1	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	93	96	103%
		2	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	93	100	108%
2	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	1	Persentase Penanganan Perkara tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat	100	100	100%
		2	Persentase Terbinanya Lembaga Kemasyarakatan	97	97	100%
		3	Persentase Penyelesaian Sengketa Hukum	100	100	100%
		4	Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia	87	87	100%
		5	Persentase Capaian Kinerja Walikota (KPI, Perkin dan Lakip)	95	100	105%
		6	Persentase Jumlah Wirausaha Baru Yang Tercapai	100	100	100%
		7	indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	4 Index	4 Index	100%
		8	Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan	4 Index	4 Index	100%
		9	Persentase Terselesaikannya Permasalahan Terhadap Pelaksanaan BOP dan BOS	100	100	100%

		10	Persentase Terselesaikannya Permasalahan Terhadap Pelaksanaan Kota Layak Anak	100	100	100%
		11	Persentase Terselesaikannya Permasalahan Terhadap Pelaksanaan Kota Sehat	100	100	100%
		12	Persentase Terselesaikannya Permasalahan Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Kota	100	100	100%
		13	Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi Jakarta Barat > 80 %	88	99,58	113%
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1	Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor	4 Index	4 Index	100%
		2	Jumlah Kawasan yang Tertata	1 Kawasan	1 Kawasan	100%
		3	Jumlah Kantor dan Rumah Dinas Camat dan Lurah yang memenuhi standar	4 Index	4 Index	100%
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	4 Index	4 Index	100%
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Kelurahan, Kecamatan dan Kota/Kabupaten Administrasi	4 Index	4 Index	100%
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Indeks Kepuasan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah	4 Index	4 Index	100%

Perbandingan capaian indikator kinerja hanya dilakukan antara tahun 2021 dengan tahun 2022, mengingat terdapat perbedaan program dan indikator kinerja program yang hanya berlaku pada tahun 2022. Secara terperinci perbandingan kinerja yang terkait dengan target dan realisasi dari setiap indikator kinerja program mulai dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Adapun perbandingan capaian dari setiap indikator kinerja program antara tahun 2021 dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 16
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Program
Tahun 2021 dengan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Capaian	Capaian	Peningkatan/Penurunan
		2021	2022	
1	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	107,77%	103%	-5%
2	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	108,70%	107,53%	-1,17%
3	Persentase Penanganan Perkara tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat	100%	100%	0%
4	Persentase Terbinanya Lembaga Kemasyarakatan	100%	100%	0%
5	Persentase Penyelesaian Sengketa Hukum	100%	100%	0%
6	Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia	0%	100%	100%
7	Persentase Capaian Kinerja Walikota (KPI, Perkin dan Lakip)	105,25%	105,26%	0,01%
8	Persentase Jumlah Wirausaha Baru Yang Tercapai	100%	100%	0%
9	Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	100%	100%	0%

10	Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolalan	100%	100%	0%
11	Persentase Terelesaikannya Permasalahan Terhadap Pelaksanaan BOP dan BOS	100%	100%	0%
12	Persentase Terelesaikannya Permasalahan Terhadap Pelaksanaan Kota Layak Anak	100%	100%	0%
13	Persentase Terelesaikannya Permasalahan Terhadap Pelaksanaan Kota Sehat	100%	100%	0%
14	Persentase Terelesaikannya Permasalahan Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Kota	100%	100%	0,00%
15	Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi Jakarta Barat > 80 %	108,17%	113%	5%
16	Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor	100%	100%	0%
17	Jumlah Kawasan yang Tertata	0%	100%	100%
18	Jumlah Kantor dan Rumah Dinas Camat dan Lurah yang memenuhi standar	0%	100%	100%
19	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	0%
20	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Kelurahan, Kecamatan dan Kota/Kabupaten Administrasi	0%	100%	100%
21	Indeks Kepuasan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah	100%	100%	0%
	Rata-Rata Capaian	82%	101%	19%

Berdasarkan berbagai tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja program telah terealisasi dengan baik hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata capaian indikator kinerja program yang mencapai 101% dengan mengalami kenaikan sebesar 19% dibandingkan capaian

pada tahun 2021. Kenaikan angka rata-rata capaian indikator kinerja program tersebut didukung dengan realisasi pelaksanaan yang baik dan melakukan antisipasi lebih awal dalam menghadapi permasalahan yang berpotensi menjadi penghambat, salah satu yang terdampak oleh situasi pandemi Covid-19 dan tidak ada nilai realisasi sehingga indikator kinerja program yang berkaitan dengan kegiatan fisik tidak dapat terselenggara dengan baik.

Dari hasil evaluasi tersebut, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan dan perlu mendapat perhatian bagi perbaikan kinerja demi terselenggaranya pelaksanaan program dan kegiatan secara lebih baik, antara lain :

1. Peningkatan koordinasi antar perangkat daerah.
2. Monitoring dan evaluasi secara rutin setiap bulan dalam capaian program.
3. Inovasi dan kreatifitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
4. Melakukan usulan pengecualian pada nilai indikator pada waktu target realisasi sehingga tidak menjadi perhitungan didukung dengan penjelasan terkait.

2. Capaian Indikator Kinerja Utama

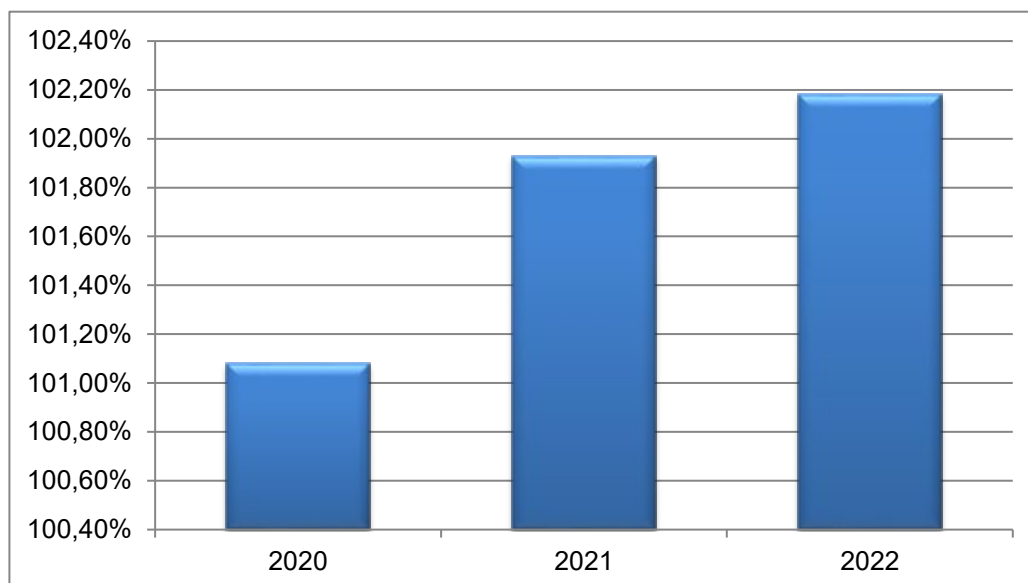
Pada tahun kelima dari periode Rencana Strategis Kota Administrasi Jakarta Barat 2017-2022, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran jangka panjang yang ditetapkan telah dapat terlaksana dengan cukup baik. Pencapaian

sasaran strategis, indikator dan target kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Barat pada akhir tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 17
Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja
Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat untuk menciptakan Jakarta sebagai kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban dan kesejahteraan bagi semua	Indeks Reformasi Birokrasi	91	Nilai	n/a	n/a
		Capaian Sasaran Strategis		n/a		
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Kota Administrasi Jakarta Barat	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,5	Nilai	93,59	105,75%
		Capaian Sasaran Strategis		105,75%		
3	Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	91	Indeks	89,74	99%
		Capaian Sasaran Strategis		99%		
Capaian Kinerja Kota Administrasi						102,18%

Sedangkan perkembangan capaian Perjanjian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Barat mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 sampai dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :





Grafik 2
Perbandingan Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dari tabel hasil pengukuran dan grafik perbandingan capaian tersebut diatas, dapat dilihat bahwa selama 3 (tiga) tahun terakhir realisasi Perjanjian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Barat senantiasa harapan berada diatas 100%. Grafik capaian Perjanjian Kinerja menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun. Berdasarkan hasil evaluasi, kenaikan dikarenakan nilai indeks kepuasan masyarakat yang naik dan mendapatkan hasil sangat baik. Selain itu pada indikator kinerja Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam rangka mewujudkan sasaran strategis “Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel” belum diperhitungkan sampai akhir tahun dikarenakan belum terlaksana semua kegiatan. Pada indikator Indeks Reformasi Birokrasi belum tersedianya hasil nilai dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia pada tahun 2022, sehingga nilai realisasi n/a.

Mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perhitungan capaian indikator kinerja tersebut diinterpretasikan sebagai berikut:

Tabel 18
Interpretasi Capaian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Capaian	Realisasi		
1	Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat untuk menciptakan Jakarta sebagai kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban dan kesejahteraan bagi semua	n/a	-	-	-
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Kota Administrasi Jakarta Barat	105,75%	AA	Memuaskan	
3	Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran	99%	AA	Memuaskan	
	Capaian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Barat	102,18%	AA	Memuaskan	

Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa secara keseluruhan nilai capaian kinerja Kota Administrasi Jakarta Barat pada tahun 2022 adalah sebesar 102,18%. Dengan nilai tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja Kota Administrasi Jakarta Barat tahun 2022 untuk

mewujudkan target, sasaran strategis dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 antara Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat dengan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, telah terselenggara dengan baik dan menunjukkan kinerja yang termasuk dalam kategori AA atau memuaskan.

Sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kota Administrasi Jakarta Barat” berhasil melampaui target yang ditetapkan sementara sasaran strategis “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel” walaupun tidak mencapai target yang ditetapkan akan tetapi capaian kinerjanya masih termasuk kategori memuaskan. Sasaran strategis “Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat untuk menciptakan Jakarta sebagai kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban dan kesejahteraan bagi semua” dengan indeks Reformasi Birokrasi menunggu hasil penilaian tahun 2022 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Selanjutnya evaluasi dan analisa terhadap capaian kinerja Kota Administrasi Jakarta Barat dari masing-masing sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut :



Sasaran 1

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Kota Administrasi Jakarta Barat

Pemerintahan akan sangat terbantu kinerjanya apabila tata kelola pemerintahan merupakan tata kelola pemerintahan yang baik. Dimensi dari good governance yang memiliki keterkaitan erat dengan aspek akuntansi adalah transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dalam tatakelola pemerintahan memiliki arti sejauhmana pemerintahan memenuhi hak masyarakat dalam mendapatkan informasi yang benar. Transparansi memungkinkan semua stakeholder dalam melihat struktur dan fungsi pemerintahan, tujuan dari kebijakan dan proyeksi keuangan serta laporan pertanggungjawaban. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.

Sementara akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerja suatu organisasi. Dengan demikian transparan dan akuntabel dapat dimaknai sebagai kemampuan pejabat publik untuk menjawab secara terbuka segala pertanyaan dari masyarakat yang memberinya delegasi dan kewenangan untuk mengurus berbagai urusan dan kepentingan mereka.

Untuk mengukur kinerja aparatur di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat (*stakeholder*) perihal kebutuhan dan harapan, maka atas dasar

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 197 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Surat Keputusan Walikota Nomor 26 Tahun 2022 tentang Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi Jakarta Barat. diadakanlah Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Salah satu menjadi perhatian survei, maka Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan terhadap 6 (enam) jenis layanan yakni Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dan Ketertiban Umum (Tibum). Sedangkan untuk 4 (empat) jenis layanan lainnya yakni Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Juru Pemantau Jentik (Jumantik), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dapat dilakukan penilaian pada kegiatan operasional dari layanan tersebut sampai triwulan IV.

Survei Kepuasan Masyarakat adalah Pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka disebut Indeks Kepuasan Masyarakat, angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Unsur survei kepuasan masyarakat merupakan faktor dan aspek yang dijadikan pengukuran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik. Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala diperlukan

survei secara periodik dan berkesinambungan. Perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik. Jangka waktu survei antara periode yang satu ke periode berikutnya dapat dilakukan 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan atau sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam hal ini instansi-instansi yang memberikan pelayanan dituntut untuk memberikan pelayanan yang memuaskan. Penentuan standar pelayanan adalah salah satu bentuk upaya mencapai kepuasan pelanggan. Cara yang lain adalah dengan mengukur langsung tingkat kepuasan masyarakat atas kualitas layanan yang telah diterima. Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat menghasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). IKM sangat berguna untuk memahami kebutuhan pengguna layanan dan sebagai tolok ukur kinerja pelayanan publik. Panduan Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017.

Keberhasilan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas selalu menjadi tantangan bagi institusi pelayanan baik publik maupun

swasta. Institusi pelayanan dituntut menjadi organisasi yang handal dimana seluruh elemen penggerak di dalam organisasi diberikan kebebasan untuk berdiskusi dan menjalankan standar yang menjadi kesepakatan sehingga konsistensi dalam proses pelayanan tetap terjaga. Implementasi dari pelayanan yang dijalankan tersebut haruslah dipantau dan dievaluasi secara sistematis dan teratur.

Survei Kepuasan Masyarakat selain dimaksudkan untuk mengukur tingkat kepuasan, juga memungkinkan perbaikan pelayanan selain itu menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus sebagai alat untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik. Melalui analisis kinerja dapat disusun prioritas perbaikan untuk meningkatkan kualitas layanan di Walikota Jakarta Barat pengukuran yang berkesinambungan akan memungkinkan untuk mengetahui kinerja pelayanan masing-masing Kelurahan dan Kecamatan serta untuk memperoleh unsur pelayanan mana yang dianggap penting oleh masyarakat yang menjadi prioritas untuk diperbaiki kualitasnya dan adanya Indeks Kepuasan Masyarakat di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Walikota. Melalui kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat maka untuk terus mengevaluasi dan meningkatkan kualitas Pelayanan Publik, Pemerintah Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat melalui Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat mengadakan Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Kelurahan Tahun 2022.

Adapun sasaran pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat pada Kota Administrasi Jakarta Barat adalah mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan PPSU dan Ketertiban Umum, mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan PPSU dan Ketertiban Umum, mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan PPSU dan Ketertiban Umum, dan mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan PPSU dan Ketertiban Umum.

Adapun Laporan Hasil Survei Kepuasan Kota Administrasi Jakarta Barat berisi tentang hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat pada 56 (lima puluh enam) Kelurahan dan 8 (delapan) Kecamatan terhadap 9 (Sembilan) unsur pelayanan yaitu :

1. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur.
3. Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah

ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
7. Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. Sarana dan Prasarana.

Jadwal Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat di Kota Administrasi Jakarta Barat dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2022 setelah Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dari seluruh Kecamatan diterima oleh Tim Penyusun Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Jakarta Barat.

Tabel 19
Jadwal Pelaksanaan SKM
Tahun 2022

Kegiatan	Bulan				
	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Persiapan dan perencanaan SKM 2022	10 Agst	23 Sept			
Sosialisasi/ koordinasi teknis pengisian survey oleh Diskominfotik dan Wilayah Kota Administarsi Jakarta Barat		28 Sept			
Implementasi pelaksanaan SKM melalui Aplikasi di Kelurahan			1-22 Okt		
Pengolahan data/ analisis data oleh Diskominfotik			25 Okt – 14 Nov		

Diskominfotik memberikan hasil pelaksanaan SKM wilayah				15 Nov	
Pengolahan data/ analisis data oleh Bagian KKPP Jakarta Barat				15-26 Nov	
Penyampaian hasil SKM ke tingkat Provinsi				26 Nov – 3 Des	

Pelaporan dilakukan secara berjenjang yang dilakukan mulai dari Kelurahan, dihimpun oleh Kecamatan dan disusun menjadi laporan tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat.

METODELOGI

A. Persiapan Penyusunan Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

Persiapan Penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan dengan menetapkan Surat Keputusan Walikota Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi Jakarta Barat. Melalui jaksurvei.jakarta.go.id di Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2022.

B. Identitas/Karakter Responden

1. Identitas/karakter responden

No	Identitas	Jumlah Responden	Persentase
A	Jenis Kelamin		
1	Laki-laki	18.238	48,66%
2	Perempuan	19.239	51,33%
	Jumlah	37.477	100,00%
B	Pekerjaan		
1	PNS/GURU	485	1,29%
2	TNI	33	0,088%
3	POLRI	31	0,082%
4	Swasta	6.718	17,92%
5	Lainnya	30.210	80,60%

	Jumlah	37.477	100%
C	Pendidikan		
	SMA	2.468	6,58%
	SMP	5.855	15,62%
	Sarjanan S1	2.936	7,83%
	SD	2.222	5,92%
	D1/D2/D3/D4	1.346	5,04%
	Magister S2	246	0,65%
	Tidak Pernah Sekolah	55	0,14%
	Doktor S3	66	0,17%
	Tman kanak-kanak (TK)	38	0,10%
	Jumlah	37.477	100,00%

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa pengguna layanan sebagian besar :

1. Berjenis kelamin perempuan sebanyak 19.239 orang.
2. Pekerjaan lainnya sebanya 30.210 orang.
3. Pendidikan SMP/Pertama sebanyak 5.855 orang.

C. PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA

1. PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

Adapun pelaksanaan survei kepuasan masyarakat ini adalah menggunakan link dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta yang berisi:

a. Identitas Responden

Data ini terutama digunakan untuk proses dan pengelompokan responden, yang meliputi : jenis kelamin dan pekerjaan responden.

b. Pendapat Responden

Merupakan pendapat masyarakat yang meliputi kepuasan dan

keinginan atas 9 unsur pelayanan publik, dimana unsur pelayanan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yang terdiri dari :

- 1) Persyaratan
- 2) Sistem, Mekanisme dan Prosedur
- 3) Waktu Penyelesaian
- 4) Biaya / Tarif
- 5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
- 6) Kompetensi Pelaksana
- 7) Perilaku Pelaksana
- 8) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
- 9) Sarana dan Prasarana

1. PENGUMPULAN DATA DILAKSANAKAN MELALUI :

a. Pemantauan

Pemantauan adalah proses mengamati dan mencatat secara langsung di lokasi penilaian yang ada kaitannya dengan objek yang dinilai, untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.

b. Pengumpulan Data

Dalam upaya untuk memperoleh informasi tentang kondisi Kota Administrasi Jakarta Barat baik Struktur Organisasi, tugas pokok dan fungsi serta informasi lainnya. Data ini digunakan untuk melengkapi data yang telah diperoleh melalui pemantauan dan

kuesioner dengan meminta data kepada pihak-pihak yang terkait baik berupa arsip maupun dokumen.

c. Pengisian Kuesioner

Pengisian Kuesioner merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi daftar pertanyaan atau pernyataan melalui Aplikasi jaksurvei.jakarta.go.id kepada responden untuk dijawab. Kuesioner ini digunakan untuk memperoleh data tentang tingkat kepuasan masyarakat sebagai pemanfaat dari pelayanan 2 (dua) indikator tersebut.

D. PENGOLAHAN DATA

1. Penginputan hasil pengisian kuesioner

Data yang telah terkumpul dilakukan pengolahan data untuk mengetahui nilai Indeks Kepuasan Masyarakat. Nilai IKM didapatkan dari nilai rata-rata tertimbang masing masing 9 unsur pelayanan tersebut.

2. Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat

Setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus :

$$\text{Nilai Rata2 Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot 1}}{\text{Jumlah Unsur 9}} = \dots = 0,11$$

Selanjutnya untuk mendapatkan nilai IKM dilakukan perhitungan dengan rumus sebagai berikut :

Total Nilai Persepsi per Unsur

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur Yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Berdasarkan petunjuk dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dengan memperhitungkan total nilai persepsi untuk setiap unsur pelayanan, Total nilai persepsi diperoleh dengan mengalikan frekuensi responden yang memberikan jawaban untuk setiap skala penilaian. Misalnya untuk dimensi kinerja, nilai 1 diberikan untuk penilaian Sangat Tidak Setuju (STS), nilai 2 Tidak Setuju (TS), nilai 3 (Setuju) dan nilai 4 (Sangat Setuju). Selanjutnya jawaban dikonversikan dengan nilai dasar 25 digunakan untuk mendapatkan rentang penilaian antara 25 – 100 sehingga diperoleh nilai IKM. Nilai IKM kemudian diklasifikasikan ke dalam kategori A (Sangat Baik), B (Baik), C (Kurang Baik) dan D (Tidak Baik) sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,59	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,06	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,07 – 3,53	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,54 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Rumus umum dalam pengambilan ukuran sampel menurut Krejcie dan Morgan ini sebagai berikut :

$$S = \{ \lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q \} / \{ d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q \}$$

dimana :

S = jumlah sampel

λ^2 = lamda (faktor pengali) dengan dk = 1, taraf kesalahan bisa 1 %, 5 %, 10 %

N = populasi

P (populasi menyebar normal) = Q = 0,5

d = 0,05

3. Penentuan Nilai Indeks Kepuasan Kota Administrasi Jakarta Barat.

Untuk menentukan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Administrasi Jakarta Barat dihitung dengan memperhitungkan total nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat seluruh Kecamatan dibagi jumlah Kecamatan, maka IKM Kota Administrasi Jakarta Barat ditentukan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM Kota Administrasi Jakarta Barat} = \frac{\text{total IKM Kecamatan}}{\text{Jumlah Kecamatan}}$$

4. Jenis Pelayanan dan Jumlah Responden

Penyusunan Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Jakarta Barat merupakan kompilasi data dari 2 (dua) jenis pelayanan dengan jumlah responden sebanyak (jumlah responden x jumlah Kecamatan) responden, dengan jenis pelayanan setiap kelurahan sebagai berikut:

a. Pelayanan PPSU;

b. Pelayanan Keamanan dan Ketertiban.

Total jumlah responden sebanyak 37.477 (Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh) responden.

E. HASIL PENGOLAHAN DATA

Kota Administrasi Jakarta Barat telah melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat pada bulan Oktober Tahun 2022 dengan jenis survei sesuai dengan indikator. Data tersebut diolah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Jakarta Barat didapatkan dari nilai rata-rata IKM pelayanan masing-masing Kecamatan sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 20
Nilai SKM Pada Kecamatan Kota Adm Jakarta Barat
Tahun 2022

No.	KECAMATAN	NILAI IKM						
		JUMANTIK	TIBUM	PKK	POSYANDU	PPSU	RPTRA	IKM
1	Cengkareng	90,88	92,35	91,03	90,62	89,71	91,71	91,05
2	Grogol Petamburan	96,39	97,07	97,21	96,79	95,98	96,80	96,70
3	Kalideres	96,70	96,25	96,55	96,87	95,78	96,83	96,54
4	Kebon Jeruk	93,16	95,12	93,24	93,17	94,52	89,42	93,72
5	Kembangan	97,67	97,66	97,54	97,58	96,30	97,24	97,33
6	Palmerah	87,66	89,76	88,59	88,94	89,72	87,52	89,02
7	Tamansari	89,79	91,33	89,70	89,90	92,41	89,91	90,71
8	Tambora	93,45	94,59	93,21	93,38	93,63	86,38	93,62
IKM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT		93,21	94,27	93,38	93,41	93,51	91,98	93,59

Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan di 8 (delapan) Kecamatan dan 56 Kelurahan lingkup Kota Administrasi Jakarta Barat. Kelurahan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat yang memiliki IKM 3 (tiga) terendah sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah:

KELURAHAN	Nilai Jenis Pelayanan						
	Jumantik	TIBUM	PKK	Posyandu	PPSU	RPTRA	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8
RAWA BUAYA	82,27	83,33	81,37	81,19	82,95	82,78	82,32
PALMERAH	82,61	85,05	83,10	83,24	86,30	85,34	84,27
DURI UTARA	84,41	85,19	83,61	83,55	85,50	-	84,45

1. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat di Kelurahan Rawa Buaya Kecamatan Cengkareng memiliki nilai terendah ada pada pelayanan Posyandu dengan nilai 81,19 dan pada 3 unsur terendah yaitu: Hasil kerja petugas umumnya baik dan memuaskan, Biaya untuk mendapatkan pelayanan gratis, serta Waktu penyelesaian pekerjaan selesai dengan cepat dan hasilnya sesuai yang diharapkan.
2. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat di Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah memiliki nilai terendah ada pada pelayanan Jumantik dengan nilai 82,61 dan pada 3 unsur terendah yaitu: Prosedur mendapatkan pelayanan mudah, Waktu penyelesaian pekerjaan selesai dengan cepat dan hasilnya sesuai yang diharapkan, serta Penanganan pengaduan terhadap perilaku dan kinerja petugas ditindaklanjuti dengan baik.

3. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat di Kelurahan Duri Utara, Kecamatan Tambora memiliki nilai terendah ada pada pelayanan Posyandu dengan nilai 83,55 dan pada 3 unsur terendah yaitu: Persyaratan dalam mendapatkan pelayanan mudah, Hasil kerja petugas umumnya baik dan memuaskan, serta Sarana dan prasarana yang digunakan petugas berfungsi dengan baik.

Di Kota Administrasi Jakarta Barat Kelurahan yang memiliki IKM 3 (tiga) tertinggi sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah:

KELURAHAN	Nilai Jenis Pelayanan						
	Jumantik	TIBUM	PKK	Posyandu	PPSU	RPTRA	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8
TOMANG	99,81	99,94	100,00	100,00	99,92	100,00	99,95
KEMBANGAN UTARA	99,12	99,52	99,84	99,81	99,46	98,92	99,45
TANJUNG DUREN UTARA	100,00	99,12	100,00	100,00	98,42	97,03	99,09

1. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat di Kelurahan Tomang Kecamatan memiliki nilai tertinggi ada pada 3 (tiga) pelayanan yaitu PKK, Posyandu, dan RPTRA dengan nilai 100. Seluruh 9 (Sembilan) unsur mendapat nilai 100 yaitu: Persyaratan dalam mendapatkan pelayanan mudah, Prosedur mendapatkan pelayanan mudah, Waktu penyelesaian pekerjaan selesai dengan cepat dan hasilnya sesuai yang diharapkan, Biaya untuk mendapatkan pelayanan gratis, Hasil kerja petugas umumnya baik dan memuaskan, Kompetensi petugas mendukung kelancaran penyelesaian semua pekerjaannya, Perilaku petugas sopan dan ramah saat memberikan pelayanan kepada masyarakat, Penanganan pengaduan terhadap perilaku

dan kinerja petugas ditindaklanjuti dengan baik, serta Sarana dan prasarana yang digunakan petugas berfungsi dengan baik.

2. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat di Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan memiliki nilai tertinggi ada pada pelayanan PKK dengan nilai 99,84 dan pada unsur tertinggi yaitu: Persyaratan dalam mendapatkan pelayanan mudah.
3. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat di Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan memiliki nilai tertinggi ada pada pelayanan Jumantik, PKK dan Posyandu dengan nilai 100. Seluruh 9 (Sembilan) unsur mendapat nilai 100 yaitu: Persyaratan dalam mendapatkan pelayanan mudah, Prosedur mendapatkan pelayanan mudah, Waktu penyelesaian pekerjaan selesai dengan cepat dan hasilnya sesuai yang diharapkan, Biaya untuk mendapatkan pelayanan gratis, Hasil kerja petugas umumnya baik dan memuaskan, Kompetensi petugas mendukung kelancaran penyelesaian semua pekerjaannya, Perilaku petugas sopan dan ramah saat memberikan pelayanan kepada masyarakat, Penanganan pengaduan terhadap perilaku dan kinerja petugas ditindaklanjuti dengan baik, serta Sarana dan prasarana yang digunakan petugas berfungsi dengan baik.

B. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Administrasi Jakarta Barat

IKM Kota Administrasi Jakarta Barat : $\frac{\text{total SKM Kecamatan}}{\text{Jumlah Kecamatan}}$

Jadi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Administrasi Jakarta Barat

Pada Tahun 2022 dengan nilai 93,59 (SANGAT BAIK). Dari pengolahan hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan di seluruh Kota Administrasi Jakarta Barat pada tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara total responden menilai pelayanan yang diterima di Kota Administrasi Jakarta Barat sudah berada dalam kategori Sangat Baik dengan nilai IKM sebesar 93,59 hal tersebut dikarenakan hampir semua nilai IKM di Kecamatan berada di atas batas minimal nilai IKM, yaitu:
 - a. Kecamatan Cengkareng, nilai IKM = 91,05
 - b. Kecamatan Grogol Petamburan, nilai IKM = 96,70
 - c. Kecamatan Kalideres, nilai IKM = 96,54
 - d. Kecamatan Kebon Jeruk, nilai IKM = 93,72
 - e. Kecamatan Kembangan, nilai IKM = 97,33
 - f. Kecamatan Palmerah, nilai IKM = 89,02
 - g. Kecamatan Tamansari, nilai IKM = 90,71
 - h. Kecamatan Tambora, nilai IKM = 93,62
2. Masih adanya beberapa Kecamatan dan Kelurahan yang memerlukan perbaikan dan pembinaan terhadap tingkat kepuasan masyarakat pada unsur-unsur pelayanan yang masih rendah.

Untuk meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Jakarta Barat perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mensosialisasikan kembali penggunaan Aplikasi pada jaksurvei.jakarta.go.id dalam melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat
- b. Meningkatkan kinerja serta kemampuan para pengelola dalam memberikan pelayanan.

Dari hasil pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dan pengolahan data/angka Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan yang dilaksanakan pada Tahun 2022, diperoleh angka Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar 93,59. Angka Indeks tersebut melebihi target yang telah ditetapkan di tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat dan Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar 88,5 . Secara terperinci angka Indeks Kepuasan Masyarakat pada masing-masing kecamatan dan kelurahan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat. Terdapat beberapa faktor yang menjadi pendorong peningkatan nilai indeks kepuasan masyarakat tersebut baik untuk masing-masing bidang pelayanan maupun nilai total kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan dan kelurahan, antara lain:

1. Dukungan masyarakat dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan yang dilaksanakan aparat kecamatan dan kelurahan.
2. Kinerja yang baik dari para Camat dan Lurah beserta seluruh jajarannya dalam memberikan layanan kemasyarakatan.
3. Koordinasi dan kerja sama yang baik dari unit/instansi terkait.
4. Penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan survei yang memberi kemudahan bagi responden.

Disamping adanya faktor pendorong tersebut, dari hasil evaluasi diketahui bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam upaya mengejar target Indeks Kepuasan Masyarakat yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022, yaitu :

1. Perubahan dan pergeseran anggaran sehingga terdapat beberapa kegiatan yang anggaran berjalan namun tidak menggunakan anggaran.
2. Terjadinya pemulihan ekonomi dari situasi darurat kesehatan berupa wabah yang disebabkan oleh virus corona atau kondisi pandemi Covid-19.

Peningkatan angka realisasi dan capaian kinerja dari sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kota Administrasi Jakarta Barat dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan (termasuk di Kelurahan), menunjukkan bahwa pada umumnya masyarakat Kota Administrasi Jakarta Barat telah puas dengan pelayanan kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh jajaran Kota Administrasi Jakarta Barat terutama dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Ketertiban Umum dan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum. Angka Indeks pada tahun 2022 tersebut melebihi target yang telah ditetapkan di tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat dan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yaitu sebesar 88,5 dan termasuk dalam kategori B (Baik).

Sasaran 2

Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel

Tercapai tidaknya Sasaran strategis “Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel” ditentukan oleh realisasi dari indikator kinerja “Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran” yang memiliki 3 (tiga) komponen, yaitu :

Tabel 21
Komponen Pengukuran Indikator Kinerja
Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

No	Komponen	Definisi Operasional	Bobot
1	Penyerapan Anggaran	Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi belanja barang, belanja modal yang dilaksanakan dibandingkan pagu belanja barang dan belanja modal yang telah ditetapkan di lingkungan perangkat daerah	40%
2	Efisiensi	Efisiensi adalah hasil lebih atau sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari suatu kegiatan yang target sarannya telah dicapai. apabila pencapaian output tidak tercapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. hasil lebih sisa dana adalah selisih lebih pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak dialihkan kembali untuk kegiatan /belanja lainnya	10%
3	Pencapaian output :	output belanja adalah output yang terdapat pada DPA perangkat daerah. realisasi pencapaian output dapat dilihat dalam aplikasi e-monev Anggaran.	50%

Berdasarkan data yang terdapat pada sistem Monitoring dan Evaluasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui alamat website monev.bapedadki.net dan sistem eSAKIP, dilakukan pengolahan data atas komponen penyerapan anggaran, efisiensi dan pencapaian output, dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 22
Hasil Pengukuran Indikator Kegiatan Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi Tahun 2022

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	1)Serapan Anggaran $\geq 80\%$ dan output 100% Realisasi = $(40\%) + ((\% \text{efisiensi} \times 10\%)/20\%) + (50\%)$ 2)Serapan Anggaran $< 80\%$ dan ouput $< 100\%$ Realisasi = $(\text{Penyerapan Anggaran} \times 40\%) + (\text{pencapaian output} \times 50\%)$ 3)Serapan Anggaran $\geq 80\%$, namun output $< 100\%$ Realisasi = $(40\%) + (\text{pencapaian output} \times 50\%)$	91%	89,74%	98,62%	Realisasi Indikator Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 adalah sebesar 89,74%, dengan capaian 98,62% dari target.

Dari tabel tersebut di atas, dapat diketahui bahwa capaian Kota Administrasi Jakarta Barat untuk indikator kinerja “Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran” yang merupakan ukuran dari sasaran strategis “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel” belum berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab capaian indikator kinerja hanya mencapai capaian 98,62 %, antara lain:

1. Keterlambatan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) pada awal tahun anggaran yang menyebabkan keraguan dan keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Realisasi anggaran yang tidak 100 % pada beberapa kelurahan sehingga terdapat beberapa akumulatif kegiatan yang anggarannya tidak terserap dengan baik.
3. Terjadinya bencana alam seperti kebakaran dan banjir pada beberapa titik Kelurahan.

Sasaran strategis “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel” walaupun tidak mencapai target yang ditetapkan akan tetapi capaian kinerjanya masih termasuk kategori memuaskan. Hal ini menunjukkan bahwa jajaran Kota Administrasi Jakarta Barat telah berupaya secara maksimal dalam mewujudkan target kinerja yang ditetapkan dengan didukung oleh koordinasi dan kerja sama yang baik dari unit kerja perangkat daerah di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Barat.



Bahwa di Kota Administrasi Jakarta Barat terdapat indikator tujuan “ Indeks Reformasi Birokrasi” dengan realisasi penilaian Indeks Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tahun 2022, dengan target nilai 91 dan menjadi sasaran Kota Administrasi Jakarta Barat yaitu

Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat untuk menciptakan Jakarta sebagai kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban dan kesejahteraan bagi semua. Pada target indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi. Pada lampiran nota dinas Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta kepada Assisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta disampaikan hasil evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 masih belum disampaikan oleh KemePAN dan RB sehingga belum dapat disajikan data capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022.

Untuk "Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur" dilakukan Pelaksanaan Evaluasi Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) tahun 2022 dengan penilaian internal didampingi oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. Adapun penilaian Indeks Reformasi Birokrasi tidak tersedia sampai Desember 2022 penilaian mandiri menjadi penilaian awal pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Kota Administrasi Jakarta Barat.

Evaluasi dilaksanakan terhadap komponen pengungkit (proses) atas aspek pemenuhan dan aspek reformasi dengan nilai 33,45 atau 92,15%. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen pengungkit yang dievaluasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 23
Hasil Penilaian Mandiri
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kota Adm Jakarta Barat

Aspek Pemenuhan		
1	Manajemen Perubahan	2,00
2	Deregulasi Kebijakan	1,00
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	2,00
4	Penataan dan Tatalaksana	1,00
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	1,40
6	Penguatan Akuntabilitas	2,50
7	Penguatan Pengawasan	2,20
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,50
Aspek Perubahan		
1	Manajemen Perubahan	3,00
2	Deregulasi Kebijakan	2,00
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	1,50
4	Penataan dan Tatalaksana	3,75
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	2,00
6	Penguatan Akuntabilitas	3,26
7	Penguatan Pengawasan	1,95
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3,75
Total		35,81

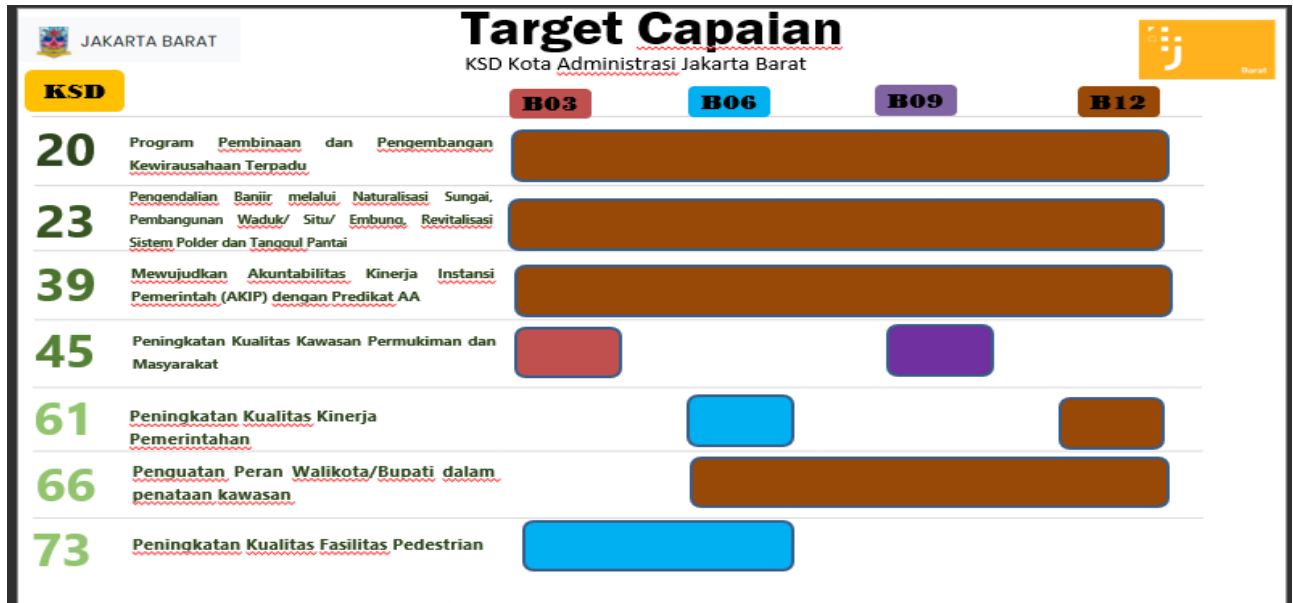
Hal ini menunjukkan bahwa jajaran Kota Administrasi Jakarta Barat telah berupaya secara maksimal dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi dan mencapai nilai pada target kinerja yang ditetapkan dengan didukung oleh koordinasi dan kerja sama yang baik dari unit kerja perangkat daerah di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Barat.

Capaian Kegiatan Strategis Daerah

1. Capaian Kegiatan Strategis Daerah 2022

Sebagai dukungan pelaksanaan perjanjian kinerja pada Kegiatan Strategis Daerah tahun 2022 terdapat pelaksanaan sebanyak 7 KSD yang tercapai dengan realisasi pelaksanaan Rencana Aksi pada setiap triwulan pada B03, B06, B09, dan B12. Terdapat 45 Rencana Aksi yang terbagi sebanyak 13 Renaksi pada target B03, 12 Renaksi pada target B06, 8 Renaksi pada target B09, dan 12 Renaksi pada target B012. Keberhasilan pencapaian realisasi Kegiatan Strategis Daerah tercermin dari terwujud atau tidaknya dampak yang diharapkan dari pelaksanaan renaksi dengan kolaborasi dan penataan berkelanjutan bagi masyarakat Kota Administrasi Jakarta Barat. Adapun KSD Tahun 2022 pada Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai berikut :

Tabel 24
KSD Tahun 2022 Kota Adm Jakarta Barat



Hasil pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah untuk tahun 2022 yang merupakan pencapaian seluruh bagian ukpd, dan unsur teknis atas pencapaian Kota Administrasi Jakarta Barat serta perbandingannya dengan target akhir yang diharapkan, menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 25
Capaian Indikator Kinerja
KSD tahun 2022

NO	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Target	Keterangan
Kegiatan Strategis Daerah 2022						
1	Meningkatnya kewirausahaan baru	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (nomor 20)	e-Monev KSD	100%	Terealisasi pada B03,B06,B09
NO	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Target	Keterangan

2	Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/ Situ/ Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai	1	Inventarisasi lahan di atas sistem drainase perkotaan di DKI Jakarta Sosialisasi rencana penataan area sempadan dan trace Mediasi apabila terdapat permasalahan (nomor 23)	e-Monev KSD	100%	Terealisasi pada B03,B06,B09
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (nomor 39)	e-Monev KSD	100%	Belum Terealisasi pada B12
4	Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat (nomor 45)	e-Monev KSD	100%	Terealisasi pada B03,B06,B09 dan B12
5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (nomor 61)	e-Monev KSD	100%	Terealisasi pada B03,B06,B09
6	Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Penguatan Peran Walikota/ Bupati dalam penataan kawasan (nomor 66)	e-Monev KSD	100%	Terealisasi pada B03,B06,B09

7	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian (nomor 73)	e-Monev KSD	100%	Terealisasi pada B03,B06,B09
---	---	---	---	-------------	------	------------------------------

Kegiatan Strategis Daerah selain dimaksudkan untuk mendukung tingkat pembangunan dan rencana kinerja Tahun 2022, dilakukan berkelanjutan dan mencapai target sasaran yang perlu ditambah menjadi bagian dari Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2023.

Adapun pelaksanaan lanjutan pada tahun 2022 pada KSD 45 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat pada Rencana Aksi Verifikasi warga Eks Kampung Kunir yang akan menghuni rumah susun yang perlu dilengkapi pada target B03 Tahun 2022. Dari hasil pelaksanaan KSD Tahun 2022 melalui sistem monitoring ksd.jakarta.go.id dengan pengolahan data maka capaian pelaksanaan Renaksi seluruh KSD terealisasi dengan baik dengan capaian Persentase 100 % pada Tahun 2022. Persentase tersebut memenuhi target yang telah ditetapkan untuk Kota Administrasi Jakarta Barat dan Provinsi DKI Jakarta dengan Capaian 100 %. Secara terperinci dibandingkan dengan capaian setiap tahun maka pencapaian dapat digambarkan pada tabel :

Tabel 26
Perbandingan Target dan Realisasi KSD
Tahun 2018 sampai dengan tahun 2022

No	Tahun	Renaksi	Target	Realisasi	Capaian
1	2018	3	100	100	100,00%
2	2019	15	100	100	100,00%
3	2020	37	100	100	100,00%
4	2021	45	100	100	100,00%
5	2022	24	100	100	100,00%

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, realisasi KSD setiap tahunnya terealisasi dengan baik dan memuaskan serta senantiasa berhasil mencapai target yang telah ditetapkan melalui penambahan jumlah renaksi setiap tahunnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara umum Kota Administrasi Jakarta Barat mendukung dan mewujudkan kinerja Pemerintah Daerah dengan menyelesaikan target Kegiatan Strategis Daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat beberapa hal yang menjadi dukungan Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2022 dengan capaian angka 100 %, antara lain :

1. Kolaboratif unsur Kota Administrasi Jakarta Barat dalam melakukan dukungan, penyelesaian hambatan, dan memberikan rencana jangka pendek, menengah dan panjang dalam mewujudkan capaian KSD Tahun 2022.
2. Apresiasi dan dukungan stakeholder dalam pelaksanaan penataan

wilayah dan pemukiman dengan melakukan diskusi bersama dan mengutamakan kepentingan bersama sehingga pelaksanaan berjalan tepat waktu.

3. Melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala pada setiap triwulan capaian KSD 2022 yang terdapat hambatan dan memberikan laporan capaian secara berkala pada pimpinan.

Hal ini menunjukkan bahwa jajaran Kota Administrasi Jakarta Barat telah berupaya secara maksimal dalam mewujudkan target kinerja Kegiatan Strategis Daerah yang ditetapkan dengan didukung oleh koordinasi dan kerja sama yang baik dari unit kerja perangkat daerah di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Barat.

Capaian Sasaran Khusus dan Sasaran Operasional

1. Capaian Sasaran Khusus

Sebagai dukungan pelaksanaan perjanjian kinerja tahun 2022 pada Kepala Perangkat Daerah terdapat Indikator Khusus tersusun pada Sasaran Khusus tahun 2022. Sasaran Khusus pada rata-rata Capaian Kinerja Tahun 2022 mempunyai bobot 20 % pada hasil realisasi dan capaian. Terdapat empat Sasaran Khusus pada Perjanjian Kinerja 2022 yang terdiri dari pemanfaatan e-order, pencapaian opini laporan keuangan daerah WTP, implementasi strategi komunikasi publik program-program unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah Tahun 2022 dengan Predikat Baik. Indikator khusus

menjadi bagian dari Pengolahan e-kinerja dalam capaian penerimaan TPP pada Kepala Perangkat Daerah. Adapun capaian dan realisasi indikator Khusus Tahun 2022 pada Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai berikut :

Tabel 27
Indikator Khusus Tahun 2022 Kota Adm Jakarta Barat

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Target	Realisasi	Keterangan
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif	Opini laporan Keuangan	e-Kinerja	100%	100%	Pernyataan profesional BPK RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah Pemprov DKI Jakarta mendapat opini WTP=3(100%)
2	Meningkatnya Pemanfaatan E- Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Kinerja	100%	100%	Pengadaan makan minum di Sekretariat Kota, Kecamatan dan Kelurahan Kota Adm. Jakarta Barat sudah menggunakan e-Order. Dengan transaksi e-Order sebesar Rp.2.855.664.2310,-
3	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	e-Kinerja	100%	100%	Paparan Strategi Komunikasi, Editorial Plan dan Potensi Krisis diinput kedalam sistem Strakom dan materi program unggulan yang dipublikasikan melalui berbagai media .

4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022	e-Kinerja	AA (91)	91,66	Kota Administrasi Jakarta Barat memperoleh nilai 91,66 dengan predikat AA.
5	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	Nilai PMPRB Perangkat Daerah Tahun 2022	e-Kinerja	95	98,64	Kota Administrasi Jakarta Barat memperoleh nilai 98,64
6	Peningkatan penggunaan e-Office dalam kegiatan administrasi persuratan	Jumlah Surat atau Nota Dinas masuk ke akun Seluruh SKPD yang terproses / terdisposisi	e-Kinerja	100%	100%	Jumlah surat masuk pada bulan Januari s.d Desember 2022 sejumlah 2.690 surat dan sudah ditindaklanjuti sejumlah 2.690 surat
7	Peningkatan penggunaan e-Produk hukum	Jumlah perbal/produk hukum yang dibuat melalui sistem e-perbal	e-Kinerja	100%	100%	Jumlah produk hukum (SK) sebanyak 23 perbal, jumlah pemanfaatan melalui e-Perbal sebanyak 23 perbal sehingga capaian pemanfaatan e-Perbal telah tercapai 100%

Capaian Sasaran Khusus Tahun 2022 telah tercapai sesuai dengan kesepakatan perjanjian kinerja. Pada pelaksanaan indikator pemanfaatan e-order dan pemanfaatan Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tercapai 100 %. Capaian ini merupakan dukungan dan Kerjasama perangkat daerah pada Kota Administrasi Jakarta Barat termasuk Kelurahan dan Kecamatan dalam memastikan terinformasi program unggulan tersampaikan dengan baik. Pada capaian

laporan opini keuangan daerah telah terealisasi predikat WTP telah tercapai 100% pada Triwulan II pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada indikator Predikat SAKIP Kota Administrasi Jakarta Barat pada tahun 2022 sebagai indikator keberhasilan Nilai/Predikat diperoleh dari hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan capaian nilai SAKIP 91,66. Pelaksanaan hasil dituangkan dalam Keputusan Gubernur menjadikan nilai Predikat Kota Administrasi Jakarta Barat dengan predikat AA.

Adapun pelaksanaan indikator khusus mencapai Persentase pemenuhan target yang telah ditetapkan untuk Kota Administrasi Jakarta Barat dan Provinsi DKI Jakarta dengan Capaian rata-rata 100 %. Secara terperinci dibandingkan dengan capaian setiap tahun maka pencapaian dapat digambarkan pada tabel :

Tabel 28
Perbandingan Indikator Khusus
Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2022

No	Indikator Khusus	2020	2021	2022	Capaian	Keterangan
1	WTP	100%	100%	100%	100,00%	Tercapai
2	e-Order	0%	100%	100%	100,00%	Naik 100%
3	Strategi Komunikasi	100%	100%	100%	100,00%	Tercapai
4	Predikat SAKIP	83	93,85	91,66	100,73%	Turun 2,19%
5	Nilai PMPRB	0	0	98,64	104,00%	Tercapai
6	e-Office	0	0	100%	100,00%	Naik 100%
7	e-Perbal	0	0	100%	100,00%	Naik 100%

Hasil pelaksanaan Indikator Khusus pada pelaksanaan e-order baru dilaksanakan pada tahun 2022 dengan capaian 100 % dan Predikat Sakip serta PMPRB yang belum tersedia. Capaian sasaran khusus ini

merupakan kinerja bersama dalam memberikan capaian realisasi yang baik pada masyarakat dan komitmen melakukan perubahan dalam mendukung Program Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan hasil evaluasi tabel dan capaian, terdapat beberapa hal yang menjadi dukungan pada sasaran khusus Tahun 2022 dengan capaian angka rata-rata 100,6 %, antara lain :

1. Pelaksanaan pemanfaatan e-order dapat mudah dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab mendukung transparansi, kemudahan, dan pemanfaatan UMKM.
2. Implementasi Strategi Komunikasi Publik yang disusun secara berkala tersosialisasi dengan baik dengan pemenuhan kebutuhan tepat sasaran pada setiap Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Barat.
3. Dukungan penggunaan e-SAKIP dalam perencanaan, penggunaan dan implementasi pada seluruh pejabat pengampu dengan melakukan perencanaan, realisasi tepat waktu dan mencapai target dengan baik.
4. Akuntabilitas pelaksanaan opini keuangan dapat secara akuntabel mempertahankan WTP selama 5 Tahun berturut-turut.

Hal ini menunjukkan bahwa jajaran Kota Administrasi Jakarta Barat telah berupaya secara maksimal dalam mewujudkan target kinerja Sasaran Khusus yang ditetapkan dengan didukung oleh koordinasi dan kerja sama yang baik dari unit kerja perangkat daerah di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Barat.

2. Capaian Sasaran Operasional

Sebagai dukungan pelaksanaan perjanjian kinerja tahun 2022 pada Kepala Perangkat Daerah terdapat penyusunan Sasaran Operasional yang mendukung pelaksanaan sasaran sebanyak tiga indikator operasional pada tahun 2022. Sasaran Operasional pada masing-masing indikator Capaian Kinerja Tahun 2022 mempunyai bobot 15 % pada masing-masing hasil realisasi dan capaian. Terdapat tiga Sasaran Operasional pada Perjanjian Kinerja 2022 yang terdiri dari arahan Gubernur , Tindak lanjut aduan masyarakat, dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK. Indikator operasional menjadi bagian dari Pengolahan e-kinerja dalam capaian penerimaan TPP pada Kepala Perangkat Daerah. Adapun capaian dan realisasi indikator Khusus Tahun 2022 pada Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai berikut :

Tabel 29
Indikator Operasional Tahun 2022 Kota Adm Jakarta Barat

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Target	Realisasi	Keterangan
Sasaran Operasional						
1	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubenur	e-Kinerja	100%	100%	Tindak Lanjut Arahan Gubernur ditindak lanjuti
2	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	100%	100%	Penyelesaian Aduan Masyarakat melalui aplikasi CRM dengan total aduan 4851 Aduan dan terselesaikan

3	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil	e-Kinerja	25%	25%	Pelaksanaan tindak lanjut tercapai setiap triwulan dan terealisasi 100%
---	---	---	-----------	-----	-----	---

Capaian Sasaran Operasional Tahun 2022 telah tercapai sesuai dengan kesepakatan perjanjian kinerja. Pada pelaksanaan indikator Tindak Lanjut arahan Gubernur telah terselesaikan sebanyak 8 Arahan yang diselesaikan dan dilaporkan kembali kepada Provinsi DKI Jakarta dengan capaian terselesaikan 100%. Pada Indikator penanganan aduan masyarakat sepanjang Tahun 2022 terdapat 4.851 Aduan Masyarakat yang ditindak lanjuti dengan capaian terselesaikan 100%. Pada indikator Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) telah terselesaikan dengan pelaksanaan capaian 100 persen pada setiap triwulan dan meningkatkan akuntabilitas kinerja Kota Administrasi Jakarta Barat.

Adapun pelaksanaan indikator operasional mencapai Persentase pemenuhan target yang telah ditetapkan untuk Kota Administrasi Jakarta Barat dan Provinsi DKI Jakarta dengan Capaian rata-rata 100%.

Secara terperinci dibandingkan dengan capaian setiap tahun maka pencapaian dapat digambarkan pada tabel :

Tabel 30
Perbandingan Indikator Operasional
Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2022

No	Indikator Khusus	2020	2021	2022	Capaian	Keterangan
1	Arahan Gubernur	100%	100%	100%	100,00%	Terealisasi
2	TL Aduan Masyarakat	99.70%	99.96%	100%	100,00%	Terselesaikan
3	SKM	93	94.8	-	-	-
4	TLHP BPK	100%	100%	100%	100,00%	Terselesaikan

Hasil pelaksanaan Indikator Operasional pada pelaksanaan Tindak Lanjut Aduan Masyarakat meningkat dalam penanganan sepanjang Tahun 2022. Hal ini menjadi kinerja keras Aparatur Sipil Negara Kota Administrasi Jakarta Barat dalam bergerak cepat, tepat dan akurat dalam penyelesaian permasalahan yang dilaporkan. Berdasarkan hasil evaluasi tabel dan capaian, terdapat beberapa hal yang menjadi dukungan pada sasaran operasional Tahun 2022 dengan capaian angka rata-rata 100 %, antara lain :

1. Penanganan Tindak Lanjut Aduan Masyarakat dilaksanakan sesuai SOP dan tepat sasaran dengan kualitas baik dan memuaskan.
2. Penerapan Budaya Organisasi bagi Pegawai pada Kota Administrasi Jakarta Barat yaitu Berintegritas, Kolaboratif, Akuntabel, Integritas dan Berkeadilan.
3. Dukungan stakeholder 4 Pilar dalam mendukung rencana kinerja serta realisasi di lapangan mencapai hasil kolaboratif yang

memuaskan.

4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam memastikan penyelesaian hambatan dan kendala pelaksanaan capaian sasaran operasional yang dilaksanakan setiap bulan pada Tahun 2022.

Kota Administrasi Jakarta Barat telah berupaya secara maksimal dalam mewujudkan target kinerja Sasaran Operasioal yang ditetapkan dengan didukung oleh koordinasi dan kerja sama yang baik dari unit kerja perangkat daerah di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Barat.

Analisis Capaian Kinerja Tahun 2022

1. Capaian Kinerja Tahun 2022

Kinerja (performance) adalah tingkat prestasi atau hasil nyata seseorang yang dihitung secara periodik baik kualitas maupun kuantitas berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai hasil kewenangan dan tanggung jawab sebuah pekerjaan dalam suatu perusahaan atau organisasi.

Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang atau jasa, kualitas barang atau jasa, perbandingan hasil kerja dengan target dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam formulir Pengukuran Kinerja.

Pengukuran kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase, indeks, rata-rata, angka dan jumlah. Presentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik dukungan pelaksanaan perjanjian kinerja tahun 2022.

Tabel 31
Perbandingan Pengukuran Capaian Kinerja
Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi				2022		Capaian
			2018	2019	2020	2021	Target	Realisasi	
1	Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat untuk menciptakan Jakarta sebagai kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban dan kesejahteraan bagi semua	Indeks Reformasi Birokrasi Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan	-	-	-	-	85	n/a	-
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Kota Administrasi Jakarta Barat	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan (termasuk di Kelurahan)	-	84,06	88,01	88,01	86	90,62	105,37%

3	Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	-	-	89,60%	89,60%	91%	89,74%	98,62%
---	--	--	---	---	--------	--------	-----	--------	--------

2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Kota Administrasi Jakarta Barat terealisasi dengan baik dan mencapai kenaikan bila dibandingkan dengan Tahun 2021. Keberhasilan ini merupakan kebanggaan jajaran Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat dalam meningkatkan kompetensi dalam melaksanakan komitmen Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Keberhasilan adalah tingkat prestasi atau hasil nyata yang dihitung secara periodik baik kualitas maupun kuantitas berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai hasil kewenangan dan tanggung jawab sebuah pekerjaan dalam suatu perusahaan atau organisasi. Keberhasilan tercapainya target yang telah ditetapkan dengan pengukuran yang sesuai serta kriteria yang telah tercapai. Penjelasan bagaimana pelaksanaan analisa :

A. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan (termasuk di Kelurahan)

•KEBERHASILAN

Untuk mencapai suatu keberhasilan dalam penerapan indikator layanan kegiatan kemasyarakatan seharusnya membutuhkan manajemen, atau tatanan tindakan sebagai langkah-langkah strategik agar target yang diharapkan tersebut tercapai. Dengan demikian manajemen yang baik akan pendukung dalam pelaksanaan capaian target sasaran menjadi sangat penting. Manajemen yang

baik menjadi dukungan dalam capaian yang baik dengan didukung keberhasilan. Dalam kerangka mencapai suatu keberhasilan, disyaratkan adanya keterampilan manajemen yang sesuai dengan target, sasaran dan tujuan yang diharapkan. Tidak terpenuhinya tiga hal tersebut, dapat dipastikan bakal mengakibatkan kegagalan. Keberhasilan yang terjadi dalam kinerja disebabkan:

- 1) Adanya sistem, mekanisme dan prosedur serta persyaratan yang dibangun dalam memberikan pelayanan sangatlah mudah dan tidak butuh waktu lama dalam menindaklanjuti setiap warga yang membutuhkan pelayanan.
- 2) Adanya pemahaman masyarakat dalam prosedur permohonan setiap pelayanan di Kantor Kelurahan, sehingga masyarakat mudah dalam mendapatkan pelayanan.
- 3) Cepat tanggapnya pemerintah dalam merespon pengaduan.
- 4) Pemerintah pada saat melakukan penertiban menjalankan sesuai SOP dengan cara humanis.
- 5) Adanya kolaborasi pada semua stakeholder seluruh unsur aparatur Kelurahan.
- 6) Perilaku petugas sopan dan ramah saat memberikan pelayanan kepada masyarakat dan apa yang dikerjakan para petugas dirasa sudah mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
- 7) Penanganan pengaduan terhadap perilaku dan kinerja petugas ditindaklanjuti dengan baik.
- 8) Semua kegiatan dilaksanakan sesuai prosedur yang ada, tepat sasaran, cepat dan akurat.

9) Semua pelayanan gratis, bila ada pelayanan berbayar sesuai dengan tabel retribusi.

10) Telah dilakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi secara berkala.

• Faktor Kegagalan dikarenakan HAMBATAN

Pada pelaksanaan pencapaian indikator kinerja dalam pelaksanaan capaian terdapat ketidaksesuaian suatu target atau tujuan yang ingin dicapai dengan kendala hambatan yang terjadi pada pelaksanaan pada tahun 2022. Pelaksanaan monitor dan evaluasi memonitor pelaksanaan, memperbaiki capaian kinerja sesuai pencapaian target, meminimalisir resiko, dan memberikan penyelesaian bila terdapat hambatan yang terjadi. Hambatan yang terjadi dan dapat teratasi dalam capaian kinerja tahun 2022 disebabkan :

- 1) Pengendalian penyebaran Virus Covid 19 pada masa transisi endemi dengan pelaksanaan pembatasan sosial dan penegakan aturan dalam mendukung pelaksanaan 5 M.
- 2) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdampak terkena Covid 19 melakukan isolasi dan pemulihan sehingga keterbatasan Sumber Daya Manusia.
- 3) Tidak adanya kegiatan dikarenakan berskala besar dan mengalihkan kegiatan menjadi daring.
- 4) Penanganan lokasi yang sangat luas dan pengendalian yang berpotensi tidak terukur.

- 5) Laporan menggunakan CRM yang susah diidentifikasi , pelaporan tidak jelas, dan tidak dapat dipertanggung jawabkan.
- 6) Pelayanan warga yang masih minta pengurusan melalui biro jasa lainnya dan tidak mengurus sendiri sehingga terjadi penyampaian informasi yang tidak akurat. Seperti pelayanan Gratis menjadi berbayar.
- 7) Kondisi cuaca ekstrem yang mengakibatkan sarana dan prasarana terdampak untuk diperbaiki.
- 8) Realisasi penggunaan anggaran yang belum maksimal sehingga penyerapan tidak sesuai target pada beberapa kelurahan.

•Langkah-langkah TINDAK LANJUT

Dalam pelaksanaan pencapaian Indikator strategis perlu dilakukan tindak lanjut dalam penanganan potensi hambatan, Adapun Langkah-langkah tindak lanjut yaitu :

- 1) Sumber Daya Manusia yang mumpuni, yang cukup, kemampuan dan keterampilan yang dimiliki petugas sangat berdampak pada cepatnya waktu penyelesaian pelayanan sesuai SOP.
- 2) Seluruh pelayanan yang diberikan untuk masyarakat bersifat gratis (tidak dipungut bayaran) hal ini sesuai ketentuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan tidak ada pungutan liar.
- 3) Untuk pelayanan pada prinsipnya sudah melakukan prinsip pelayanan prima yaitu transparansi, akuntabilitas, kondisional serta partisipatif.

- 4) Kejelasan tupoksi petugas pelayanan, mengetahui tupoksinya masing-masing dan sudah adanya penetapan.
- 5) Adanya pembinaan kepada petugas secara rutin dan diadakan evaluasi kinerja petugas.
- 6) Dalam melaksanakan pekerjaan petugas pelayanan secara rutin harus dilaksanakan evaluasi dan penilaian kinerja yang akan menentukan apakah yang bersangkutan akan diperpanjang kontraknya ataupun dihentikan.
- 7) Diterapkan kedisiplinan dan tanggung jawab.
- 8) Sarana prasarana yang digunakan petugas berfungsi dengan baik.
- 9) Penanganan pengaduan terhadap perilaku dan kinerja petugas segera ditindaklanjuti dengan baik.
- 10) Pada saat kejadian ketertiban umum, dalam tindak lanjutnya harus dilakukan sesuai dengan SOP, dalam penanganannya harus dilakukan beberapa tahap.
- 11) Melakukan supervisi dan monev pada setiap bulan agar penyesuaian tidak berdampak pada target tidak tercapai.

B. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

•KEBERHASILAN

Pada indikator strategis terdapat penjelasan persentase kualitas pelaksanaan anggaran pada meta indikator. Keberhasilan yang dimaksud :

- Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilakukan dengan mengukur 3 Komponen yaitu :
- a. Penyerapan Anggaran. Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan di lingkungan Perangkat Daerah. Nilai penyerapan anggaran maksimal adalah 40%. Penyerapan anggaran bernilai 40% apabila serapan anggaran $\geq 80\%$. Apabila serapan anggaran di bawah $< 80\%$ maka perhitungan nilai penyerapan anggaran = (Persentase Serapan Anggaran x 40%). Anggaran yang diperhitungkan meliputi APBD dan BLU, dan tidak termasuk dana transfer dari pemerintah pusat.
 - b. Efisiensi adalah sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari subkegiatan yang target sarannya telah dicapai. Apabila pencapaian output tidak tercapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. Sisa dana adalah selisih lebih pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak dialihkan kembali untuk subkegiatan/belanja lainnya.
 - c. Pencapaian output adalah persentase capaian indikator kinerja subkegiatan (output). Capaian indikator kinerja subkegiatan (output). Realisasi pencapaian output dapat dilihat dalam aplikasi e-monev Anggaran hasil inputan PD/UKPD

Formulasi pengukuran adalah sebagai berikut:

1. Serapan Anggaran $\geq 80\%$ dan output 100%

$$\text{Realisasi} = (40\%) + ((\% \text{efisiensi} \times 10\%) / 20\%) + (50\%)$$

2. Serapan Anggaran $< 80\%$ dan output $< 100\%$

$$\text{Realisasi} = (\text{Penyerapan Anggaran} \times 40\%) + (\text{pencapaian output} \times 50\%)$$

3. Serapan Anggaran $\geq 80\%$, namun output $< 100\%$

$$\text{Realisasi} = (40\%) + (\text{pencapaian output} \times 50\%).$$

•KEGAGALAN/HAMBATAN

Pada Perjanjian Kinerja tahun 2022, pencapaian indikator kualitas pelaksanaan penggunaan Anggaran yang mencapai 89,74% dari target sebesar 91%. Hal ini tidak mencapai capaian target yang ditargetkan. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab capaian indikator kinerja antara lain :

1. Perubahan dan pergeseran anggaran sehingga terdapat beberapa kegiatan yang anggarannya dimatikan.
2. Terjadinya pemulihan situasi darurat kesehatan berupa wabah yang disebabkan oleh virus corona atau kondisi pandemi Covid-19.
3. Pelaksanaan realisasi fisik dan anggaran yang perlu dilakukan monitor dan evaluasi secara berkala.
4. Belum terealisasi semua kegiatan sampai pada Triwulan IV Tahun 2022

5. Adanya potensi utang pelaksanaan rencana yang tidak selesai tepat waktu pada tahun 2022

•Langkah-langkah TINDAK LANJUT

Dalam pelaksanaan pencapaian Indikator strategis agar mencapai target yang diharapkan maka perlu dilakukan tindak lanjut dalam penanganan potensi hambatan,

Adapun Langkah-langkah tindak lanjut yaitu :

- 1) Pelaksanaan perencanaan, monitoring dan evaluasi secara berkala agar capaian setiap bulan dan akhir tahun dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan
- 2) Perlu ada dukungan perencanaan dan pengawasan bersama secara berkala dan berkelanjutan dalam hal ini Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah serta Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.

C. Indeks Reformasi Birokrasi

•KEBERHASILAN

Pada indikator strategis terdapat penjelasan capaian Indeks Reformasi Birokrasi pada meta indikator. Keberhasilan yang dimaksud berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi maka Indeks Reformasi Birokrasi adalah nilai akhir dari serangkaian kegiatan evaluasi atau penilaian 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi , yaitu:

- a. Manajemen Perubahan

- b. Penguatan pengawasan
- c. Penguatan akuntabilitas
- d. Penataan Organisasi
- e. Penataan tatalaksana
- f. Penataan manajemen SDM
- g. Deregulasi Kebijakan
- h. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Adapun penilaian Indeks Reformasi Birokrasi dilakukan oleh Kementerian PAN-RB dan diberikan kepada Perangkat Daerah. Dalam penilaian awal maka menggunakan penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilakukan dengan pengisian Lembar Kerja Evaluasi pada Tahun 2022. Pada Tahun 2022 penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kota Administrasi Jakarta Barat mendapatkan nilai 35,81 dengan kategori Sangat Baik.

•KEGAGALAN/HAMBATAN

Pada Perjanjian Kinerja tahun 2022, pencapaian indikator Indeks Reformasi Birokrasi untuk Kota Administrasi Jakarta Barat belum tersedia sehingga capaian realisasi n/a. Hal ini menjadi evaluasi bersama dalam mendapatkan nilai Indeks Reformasi Biro Organisasi dengan kategori 91 dapat tercapai.

•Langkah-langkah TINDAK LANJUT

Dalam pelaksanaan pencapaian Indikator strategis agar mencapai target yang diharapkan maka perlu dilakukan tindak lanjut dalam penanganan potensi hambatan,

Adapun Langkah-langkah tindak lanjut yaitu :

- 1) Memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi berjalan dengan baik dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab
- 2) Perlu ada dukungan kolaboratif pada unsur teknis perencanaan, operasional dan pengawasan bersama secara berkala dan berkelanjutan dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi sekala berkelanjutan pada Kota Administrasi Jakarta Barat.

3. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas penggunaan sumber daya adalah menerangkan bahwa dalam penyelenggaraan perjanjian kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dibutuhkan Analisa Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Capaian Realisasi Anggaran, dukungan stakeholder dan mewujudkan capaian yang diharapkan. Formasi pegawai yang ada di Kota Administrasi Jakarta Barat, pelayanan kepada masyarakat dan realisasi Anggaran dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 32
Tabel Analisis Sumber Daya
Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2022

No		Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/Kelebihan	Tindak Lanjut
1	FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)				
	Jenis Jabatan Struktural:	ABK	Eksisting	Selisih +/-	
	Eselon II	3	2	-1	
	Eselon III	35	31	-4	
	Koordinator	0	0	0	
	Eselon IV	334	313	-21	
	Sub Koordinator	18	16	-2	
	Jabatan Pelaksana:				
	Satuan Pelaksana	0	0	0	

	Teknis Ahli	167	157	-10	
	Teknis Terampil	12	8	-4	
	Administrasi Ahli	168	15	-153	
	Administrasi Terampil	412	55	-357	
	Operasional Ahli	0	0	0	
	Operasional Terampil	0	0	0	
	Pelayanan Ahli	1	1	0	
	Pelayanan Terampil	6	5	-1	
	Mutasi Pegawai	0	0	0	
	Pegawai Tugas Belajar	0	0	0	
	CPNS	0	0	0	
	Jabatan Fungsional:				
	Arsiparis Ahli Madya	2	0	-2	
	Arsiparis Ahli Muda	2	2	0	
	Arsiparis Ahli Pertama	2	0	-2	
	Arsiparis Penyelia	2	0	-2	
	Arsiparis Pelaksana Lanjutan / Mahir	2	0	-2	
	Arsiparis Pelaksana	2	0	-2	
	Pustakawan Ahli Muda	1	0	-1	
	Pustakawan Ahli Pertama	1	0	-1	
	Total Pegawai	1170	605	-565	Permintaan penambahan pegawai ke BKD Prov. DKI

No		Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/ Kelebihan	Tindak Lanjut
2	REALISASI ANGGARAN	Pencapaian persentase indikator pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022	Persentase Anggaran yang terealisasi 89,74 %	Tidak terserapkan secara maksimal, dikarenakan kondisi terdampak pandemi corona covid-19, realiasi serapan dan fisik, serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional	Penyusunan Anggaran dilaksanakan dengan tahapan yang baik, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta komitmen dalam pelaksanaan akuntabilitas yang lebih baik
3	INDEKS REFORMASI BIROKRASI	Pencapaian nilai indikator pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 oleh Kemenpan RI sebesar 98,64%	Pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) dengan nilai BAIK	Pelaksanaan 8 area perubahan pada Reformasi Birokrasi Kota Administrasi Jakarta Barat perlu dukungan unsur perencanaan, operasional, dan pengawasan bersama	Pelaksanaan Penilaian mandiri harus tepat waktu, dilakukan pendampingan secara berkala oleh unsur pengawasa internal dalam hal ini adalah Inspektorat dan Biro ORB

No		Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/Kelebihan	Tindak Lanjut
4	PELAYANAN KEPADA MASYRAKAT	Bentuk pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau serta meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik.	<p>1. Pelaksanaan pelayanan publik (public service) di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang baik. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) penyelenggaraan pelayanan publik di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat khususnya di 2 (dua) jenis layanan yang telah disurvei setelah di konversikan ke dalam kolom Nilai Interval Konversi/NIK sebesar 90,62. Mutu Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat Pelayanan berpredikat "Sangat Baik".</p> <p>2. Hasil analisis pengolahan SKM memberikan informasi dari 2 (dua) jenis layanan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat.:</p> <p>3. Kelurahan yang telah mencapai Nilai Interval Konversi predikat "Sangat Baik" adalah Kelurahan Joglo, Sukabumi Selatan, dan Tanah Sereal</p>	<p>-Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan pada masa PSBB dan PPKM pada umumnya tidak mengalami perubahan dibandingkan pada situasi sebelum pandemi covid 19, namun pelayanan tetap lebih mengutamakan sistem daring yaitu melalui situs jakevo.jakarta.go.id dan pelayanan.jakarta.go.id. Pelayanan langsung dengan tatap muka tetap memperhatikan protokol kesehatan serta jaga jarak.</p> <p>- Penanganan pengaduan, saran dan masukan selama masa PSBB dan PPKM baik lewat kotak pengaduan maupun secara online melalui JAKI tetap berjalan sebagaimana pada saat kondisi normal sebelum pandemi covid 19.</p> <p>- Keterlibatan ASN dalam melaksanakan dukungan pada program Tracing dan Vaksinasi pada wilayah RW tempat bekerja sehingga menambah target kinerja selama masa pandemi Covid 19 pada Tahun 2022</p>	<p>Pelayanan tetap sesuai SOP Pelayanan Publik, Membiasakan penggunaan layanan secara daring dan memastikan warga masyarakat mudah mengakses dan memberikan layanan dukung pada masa waktu kerja.</p> <p>Penanganan aduan masyarakat melalui kanal pengaduan segera di Tindak lanjuti dengan cepat, tepat dan akurat. Penanganan Bersama teknis terkait menjadi bentuk kolaboratif dan sasaran pada capaian kinerja pada Tahun 2022.</p> <p>Memaksimalkan peran ASN dalam menjaga ketertlibatan langsung dan mengajak warga partisipasi aktif dalam pelaksanaan Vaksinasi Covid 19.</p>

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja adalah tingkat prestasi atau hasil nyata seseorang yang dihitung secara periodik baik kualitas maupun kuantitas berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah dicapai pada pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Pengukuran capaian kinerja adalah suatu proses penilaian capaian pekerjaan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan kepuasan pada masyarakat Jakarta Barat dengan perbandingan hasil kerja dengan target dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Adapun perbandingan dapat diukur dengan capaian kinerja wilayah Kota Administrasi lainnya ataupun sejenis.

Perbandingan capaian kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan sejalan dengan capaian perbandingan lainnya. Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja utama yaitu "Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan (Termasuk di Kelurahan)" pada Kota Administrasi Jakarta Barat. Pengukuran perbandingan kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk capaian nilai akhir yang dicapai rata-rata pada tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat dengan pengumpulan data berjenjang dari Kelurahan, Kecamatan, dan Kota. Perbandingan pencapaian dibandingkan dengan pencapaian pada tingkat sejenis.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 pada Lampiran halaman 1221 maka disampaikan pemantauan pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di unit pelayanan publik dengan indikator 1 indeks.

Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik I								7,0			
Pendampingan pembentukan Mall Pelayanan Publik	Jumlah Kabupaten/Kota di Kota Besar/Sedang/KEK	3 Kab/Kota	3 Kab/Kota	3 Kab/Kota	3 Kab/Kota	3 Kab/Kota	3 Kab/Kota	5,0	Daerah		07
Pemantauan pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di unit penyelenggara pelayanan publik	Jumlah Indeks Kepuasan Masyarakat Nasional	-	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1,2	Pusat		07
Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dalam Pelayanan Publik	Jumlah Intansi di Wilayah I yang Melaksanakan Forum Konsultasi Publik	-	50 IP	50 IP	50 IP	50 IP	50 IP	0,8	Pusat		04
Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik II								7,0			
Pendampingan pembentukan Mall Pelayanan Publik	Jumlah Kabupaten/Kota di Kota Besar/Sedang/KEK	3 Kab/Kota	3 Kab/Kota	3 Kab/Kota	3 Kab/Kota	3 Kab/Kota	3 Kab/Kota	5,0	Daerah		07
Pemantauan pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di unit penyelenggara pelayanan publik	Jumlah Indeks Kepuasan Masyarakat Nasional	-	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1,2	Pusat		07
Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dalam Pelayanan Publik	Jumlah Intansi di Wilayah I yang Melaksanakan Forum Konsultasi Publik	-	50 IP	50 IP	50 IP	50 IP	50 IP	0,8	Pusat		04

Perbandingan capaian IKU pada Kota Administrasi Jakarta Barat pada tahun 2022 dilakukan perbandingan pada Kota dan Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta pada indikator kepuasan masyarakat, selain itu dibandingkan pada Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Maluku Tengah. Pelaksanaan hasil nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai perbandingan merupakan hasil pada Tahun 2022

Tabel 33
Tabel Perbandingan Nilai IKM
Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kota/Kabupaten Administrasi DKI Jakarta						Kota/Kabupaten	
		Jakarta Barat	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu	Banjarnegara	Magelang
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Kota Administrasi Jakarta Barat	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan (termasuk di Kelurahan)	93,59	95,86	94,81	91,84	93,48	89,45	82,75	84,36

Realisasi Anggaran Tahun 2022

Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, dalam rangka pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis, Kota Administrasi Jakarta Barat memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 972.094.953.417,00 atau sebesar Rp 975.893.809.519,00 pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran. Dari total alokasi anggaran dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut, sebesar Rp342.794.880.695,00 dikelola Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kota Administrasi Jakarta Barat sedangkan selebihnya sebesar Rp633.098.928.824,00 terbagi dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran 8 (delapan) kecamatan dan 56 (lima puluh enam) kelurahan.

Target, realisasi dan capaian dari masing-masing program pendukung sasaran strategis Perjanjian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Barat tahun 2022 sesuai data Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Provinsi DKI Jakarta melalui alamat website monev.bapedadki.net, tercatat sebagai berikut :

Tabel 34
Realisasi Anggaran Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Kota Administrasi Jakarta Barat

No.	Program	DPA Penetapan	DPPA (Pergeseran Ke-V) TA 2022	REALISASI S/D BULAN DESEMBER	
		Anggaran	Anggaran	Keuangan	
		Rp.	Rp.	Rp.	%
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN	484.099.616.861	512.932.993.906	506.330.341.622	98,71%
2	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	13.576.824.059	13.740.812.391	10.783.125.952	78,48%
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	391.012.829.228	375.956.239.661	356.038.629.179	94,70%
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	80.580.987.641	70.475.724.657	64.230.734.202	91,14%
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	2.824.695.628	2.788.038.904	2.402.475.995	86,17%
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	0	0	0,00%
JUMLAH		972.094.953.417	975.893.809.519	939.785.306.950	96,30%

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa kinerja Kota Administrasi Jakarta Barat dalam upaya mencapai tujuan dengan mewujudkan sasaran-sasaran strategis melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang direncanakan dalam rencana strategis telah terselenggara dengan baik. Dengan capaian sebesar 96,30%, seluruh indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan telah dapat menghasilkan outcome dan output yang diharapkan.

Adapun perbandingan target dan realisasi anggaran antara tahun 2022 dengan tahun 2020 dan 2021 dimana program dan indikator kinerja program identik dengan yang dipergunakan pada tahun 2022, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 35
Perbandingan Target dan Realisasi Anggaran Perjanjian Kinerja
Tahun 2019,2020 dengan Tahun 2022

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2019	642.010.113.193	606.254.115.844	94,43%
2020	598.595.368.040	582.297.289.114	97,28%
2021	922.131.601.245	886.543.531.266	96,14%
2022	975.893.809.519	939.785.306.950	96,30%

Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat diketahui bahwa capaian kinerja anggaran Kota Administrasi Jakarta Barat mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berkenaan dengan pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2022 terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian agar pencapaian sasaran strategis maupun pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya dapat terselenggara dengan lebih baik, terdapat potensi utang yang terjadi pada kegiatan rehab Fisik dan pengawasan pada Kecamatan Taman Sari adapun sebagai berikut :

No	Kegiatan	Nama Penyedia	Pagu	Nilai Kontrak	Realisasi 2022	Persentase realisasi dari	Sisa Realisasi (Utang 2023)	Keterangan
1	REHAB FISIK CAMAT TAMANSARI	PT. PERMATA DWI LESTARI	11.008.514.856,00	8.276.147.402,40	6.207.110.550,00	75%	2.069.036.852,40	Dibayarkan APBD P 2023
2	PENGAWASAN CAMAT TAMANSARI	CV.APIK KARYA	151.661.697,00	138.219.420,00	103.664.565,00	75%	34.554.855,00	Dibayarkan APBD P 2023
3	PENGAWASAN BERKALA CAMAT TAMANSARI	PT.BAYU BERLIAN MANDIRI	24.455.013,00	24.075.900,00	0	0%	24.075.900,00	Dibayarkan APBD P 2023
Jumlah							2.127.667.607,40	

Terlihat dari tabel diatas adanya sisa realisasi untuk menjadi perhatian pada tahun berikutnya yang akan dilakukan pada anggaran perubahan atau pergeseran tahun 2023 antara lain, adapun kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya :

1. Kebijakan pergeseran serta efisiensi anggaran yang mengakibatkan sebagian besar kegiatan tidak memperoleh dukungan anggaran menuntut inovasi dan kreatifitas dari seluruh aparat dan jajaran Kota Administrasi Jakarta Barat dalam mewujudkan kinerja, outcome dan output yang diharapkan.
2. Adanya kendala keterlambatan penerbitan Surat Penyediaan Dana yang menimbulkan keraguan dalam pelaksanaan kegiatan

menunjukkan bahwa koordinasi dan kerja sama yang baik antara Kota Administrasi Jakarta Barat dengan unit kerja perangkat daerah perlu dipertahankan sehingga dapat tercipta pola hubungan kerja yang baik antara jajaran Kota Administrasi Jakarta Barat dengan seluruh perangkat daerah di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Barat.

3. Situasi dan kondisi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 mengharuskan seluruh pegawai untuk sigap dan tanggap dalam mengantisipasi berbagai perubahan keadaan serta senantiasa meningkatkan kapabilitas terutama untuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
4. Pelaksanaan realisasi anggaran dan fisik yang perlu dilakukan monitoring dan evaluasi pada setiap bulannya dalam mencapai target realisasi yang baik dan sesuai capaian.

Tabel 36
Realisasi anggaran pada SKPD/UKPD pada Tahun 2022

Tabel 37 Realisasi anggaran pada SKPD/UKPD sesuai kriteria No.	PD/ UKPD	Target (APBD Pergeseran Kelima Tahun 2022)	Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5
1	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	342.794.880.695	327.345.148.432	95,49%
2	KECAMATAN KEBON JERUK - JAKBAR	1.771.434.902	1.690.141.500	95,41%
3	KELURAHAN SUKABUMI SELATAN - JAKBAR	9.008.322.363	8.604.547.709	95,52%

4	KELURAHAN SUKABUMI UTARA - JAKBAR	9.494.569.335	9.321.625.633	98,18%
5	KELURAHAN KELAPA DUA - JAKBAR	8.018.564.648	7.820.654.907	97,53%
6	KELURAHAN DURI KEPA - JAKBAR	12.731.601.490	12.340.575.373	96,93%
7	KELURAHAN KEDOYA UTARA - JAKBAR	13.634.478.996	12.975.834.387	95,17%
8	KELURAHAN KEBON JERUK - JAKBAR	13.746.016.242	13.449.435.169	97,84%
9	KELURAHAN KEDOYA SELATAN - JAKBAR	10.118.549.641	9.855.883.420	97,40%
10	KECAMATAN KEMBANGAN - JAKBAR	1.641.142.156	1.595.038.655	97,19%
11	KELURAHAN KEMBANGAN SELATAN - JAKBAR	13.307.849.201	13.002.979.328	97,71%
12	KELURAHAN MERUYA UTARA - JAKBAR	14.473.370.192	13.842.344.758	95,64%
13	KELURAHAN MERUYA SELATAN - JAKBAR	12.336.552.221	11.799.174.232	95,64%
14	KELURAHAN SRENGSENG - JAKBAR	11.369.175.757	11.014.118.937	96,88%
15	KELURAHAN JOGLO - JAKBAR	11.967.927.083	11.509.674.397	96,17%
16	KELURAHAN KEMBANGAN UTARA - JAKBAR	12.270.351.875	11.840.161.249	96,49%
17	KECAMATAN CENGKARENG - JAKBAR	1.363.548.588	1.317.520.063	96,62%
18	KELURAHAN CENGKARENG BARAT - JAKBAR	17.301.257.116	16.722.986.161	96,66%
19	KELURAHAN CENGKARENG TIMUR - JAKBAR	18.349.710.548	17.978.318.949	97,98%
20	KELURAHAN KAPUK - JAKBAR	17.057.847.295	16.735.673.464	98,11%
21	KELURAHAN DURI KOSAMBI - JAKBAR	14.480.323.624	14.134.407.218	97,61%

22	KELURAHAN RAWA BUAYA - JAKBAR	15.702.241.819	15.230.589.775	97,00%
23	KELURAHAN KEDAUNG KALI ANGKE - JAKBAR	11.754.810.900	11.452.074.087	97,42%
24	KECAMATAN KALIDERES - JAKBAR	1.898.449.455	1.786.106.106	94,08%
25	KELURAHAN KAMAL - JAKBAR	12.339.707.191	11.754.690.341	95,26%
26	KELURAHAN TEGAL ALUR - JAKBAR	15.745.801.492	15.163.663.746	96,30%
27	KELURAHAN PEGADUNGAN - JAKBAR	16.603.524.575	16.153.873.553	97,29%
28	KELURAHAN KALIDERES -	16.081.801.150	15.619.209.271	97,12%
29	KELURAHAN SEMANAN - JAKBAR	11.847.271.475	11.458.799.003	96,72%
30	KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN - JAKBAR	2.003.774.400	1.914.649.474	95,55%
31	KELURAHAN TOMANG - JAKBAR	13.979.791.795	13.562.468.857	97,01%
32	KELURAHAN TANJUNG DUREN UTARA - JAKBAR	9.302.334.300	8.984.544.764	96,58%
33	KELURAHAN GROGOL - JAKBAR	9.565.843.268	9.158.102.309	95,74%
34	KELURAHAN JELAMBAR - JAKBAR	10.980.880.693	10.624.162.845	96,75%
35	KELURAHAN JELAMBAR BARU - JAKBAR	11.004.303.702	10.644.975.765	96,73%
36	KELURAHAN WIJAYA KUSUMA - JAKBAR	11.530.872.811	11.207.842.663	97,20%
37	KELURAHAN TANJUNG DUREN SELATAN - JAKBAR	9.019.163.763	8.672.060.063	96,15%
38	KECAMATAN PALMERAH - JAKBAR	1.696.889.220	1.619.035.881	95,41%
39	KELURAHAN PALMERAH - JAKBAR	14.462.494.865	14.013.598.393	96,90%
40	KELURAHAN KEMANGGISAN	11.022.142.288	10.945.025.281	99,30%

41	KELURAHAN SLIPI - JAKBAR	8.185.415.074	7.831.235.173	95,67%
42	KELURAHAN KOTA BAMBU UTARA - JAKBAR	9.126.967.615	8.796.095.870	96,37%
43	KELURAHAN JATI PULO - JAKBAR	11.195.918.802	10.620.665.822	94,86%
44	KELURAHAN KOTA BAMBU SELATAN - JAKBAR	8.696.879.964	8.431.578.514	96,95%
45	KECAMATAN TAMBORA - JAKBAR	1.728.079.521	1.638.163.777	94,80%
46	KELURAHAN KALI ANYAR - JAKBAR	7.968.738.477	7.721.303.003	96,89%
47	KELURAHAN DURI UTARA - JAKBAR	7.814.259.003	7.570.712.837	96,88%
48	KELURAHAN TANAH SEREAL - JAKBAR	11.127.219.675	10.814.613.508	97,19%
49	KELURAHAN KRENDANG - JAKBAR	8.239.897.265	8.103.043.748	98,34%
50	KELURAHAN JEMBATAN BESI - JAKBAR	8.872.083.952	8.551.648.051	96,39%
51	KELURAHAN ANGKE -	11.033.501.036	10.688.581.039	96,87%
52	KELURAHAN JEMBATAN LIMA - JAKBAR	8.238.090.794	8.005.587.627	97,18%
53	KELURAHAN DURI SELATAN - JAKBAR	6.891.956.404	6.733.754.613	97,70%
54	KELURAHAN TAMBORA - JAKBAR	6.794.267.142	6.499.821.219	95,67%
55	KELURAHAN PEKOJAN - JAKBAR	10.265.500.177	9.985.521.953	97,27%
56	KELURAHAN ROA MALAKA - JAKBAR	6.714.979.349	6.246.914.024	93,03%
57	KECAMATAN TAMAN SARI - JAKBAR	1.664.966.154	1.534.199.661	92,15%
58	KELURAHAN KRUKUT - JAKBAR	8.957.763.810	8.479.442.911	94,66%
59	KELURAHAN MAPHAR - JAKBAR	8.963.437.093	8.611.491.621	96,07%
60	KELURAHAN TAMAN SARI - JAKBAR	8.135.367.261	8.004.358.007	98,39%
61	KELURAHAN TANGKI -	7.790.144.254	7.509.978.375	96,40%
62	KELURAHAN	6.872.677.553	6.556.854.245	95,40%

	MANGGA BESAR – JAKBAR			
63	KELURAHAN KEAGUNGAN – JAKBAR	9.251.373.533	8.963.565.517	96,89%
64	KELURAHAN GLODOK – JAKBAR	7.246.767.155	6.988.596.578	96,44%
65	KELURAHAN PINANGSIA – JAKBAR	10.337.985.326	10.035.863.139	97,08%

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1	Program Pengelolaan Kecamatan	512.932.993.906	APBD Provinsi DKI Jakarta
2	Program Pengelolaan Kota Administrasi	13.740.812.391	APBD Provinsi DKI Jakarta
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	375.956.239.661	APBD Provinsi DKI Jakarta
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	70.475.724.657	APBD Provinsi DKI Jakarta
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah	2.788.038.904	APBD Provinsi DKI Jakarta
6	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	APBD Provinsi DKI Jakarta
JUMLAH		975.893.809.519	

Adapun Analisa pada realisasi anggaran dan fisik yang terdapat efisiensi dan tidak dilaksanakan dikarenakan gagal lelang yang perlu dilakukan monitoring dan evaluasi pada setiap bulannya dalam mencapai target realisasi yang baik dan sesuai capaian.

Tabel 37
Realisasi anggaran pada SKPD/UKPD sesuai kriteria

No.	Nama RSK	Nama Akun	Anggaran Pergeseran	Realisasi s.d 31 Des 2022	Sisa Anggaran	Kriteria
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Belanja Gaji Pokok PNS	32.748.624.300	32.400.356.600	348.267.700	Efisiensi
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	3.252.389.891	3.101.260.630	151.129.261	Efisiensi
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	2.994.820.000	2.872.020.000	122.800.000	Efisiensi
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	28.000.000	22.400.000	5.600.000	Efisiensi
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	723.195.000	678.340.000	44.855.000	Efisiensi
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Belanja Tunjangan Beras PNS	1.860.789.680	1.760.964.720	99.824.960	Efisiensi
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	30.966.911.906	30.077.963.550	888.948.356	Efisiensi
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Belanja Pembulatan Gaji PNS	500.000	357.235	142.765	Efisiensi
9	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	12.900.000.000	12.639.575.000	260.425.000	Efisiensi
10	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	194.029.530.460	192.729.950.691	1.299.579.769	Efisiensi
11	Penyediaan Kerumahtanggaan Kantor Walikota Jakarta Barat	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	8.417.376	7.975.800	441.576	Efisiensi
12	Penyediaan Kerumahtanggaan Kantor Walikota Jakarta Barat	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	9.791.100	9.440.994	350.106	Efisiensi
13	Penyediaan Kerumahtanggaan Kantor Walikota Jakarta Barat	Belanja Natura dan Pakan-Natura	141.542.984	132.753.455	8.789.529	Efisiensi
14	Penyediaan Kerumahtanggaan Rumah Dinas Walikota Jakarta Barat	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	8.417.376	8.082.900	334.476	Efisiensi
15	Penyediaan Kerumahtanggaan Rumah Dinas Walikota Jakarta Barat	Belanja Natura dan Pakan-Natura	22.082.016	17.497.854	4.584.162	Efisiensi

16	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	269.387.776	226.326.050	43.061.726	Efisiensi
17	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	23.798.805	11.520.000	12.278.805	Efisiensi
18	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3.250.080	3.164.610	85.470	Efisiensi
19	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.467.939	1.099.400	368.539	Efisiensi
20	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Modal Pompa	109.120.000	107.825.400	1.294.600	Efisiensi
21	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	155.155.704	67.710.000	87.445.704	Efisiensi
22	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Modal Alat Pendingin	15.563.266	15.207.000	356.266	Efisiensi
23	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	64.165.230	58.119.600	6.045.630	Efisiensi
24	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	250.667.463	210.938.850	39.728.613	Efisiensi
25	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Modal Personal Computer	136.470.400	129.070.800	7.399.600	Efisiensi
26	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	83.860.480	72.427.500	11.432.980	Efisiensi
27	Penyediaan Barang Cetak Umum	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	82.099.600	81.438.480	661.120	Efisiensi
28	Penyediaan Konsumsi Pelaksanaan Rapat	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	195.000.000	194.655.000	345.000	Efisiensi
29	Rehab Total Rumah Dinas Lurah Kelurahan Jatipulo	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	22.805.013	22.311.000	494.013	Efisiensi
30	Rehab Total Rumah Dinas Lurah Kelurahan Jatipulo	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	108.460.583	106.770.900	1.689.683	Efisiensi

31	Rehab Total Rumah Dinas Lurah Kelurahan Jatipulo	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	1.210.815.311	885.903.110	324.912.201	Efisiensi
32	Rehab Total Rumah Dinas Lurah Kelurahan Kapuk	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	22.805.013	22.311.000	494.013	Efisiensi
33	Rehab Total Rumah Dinas Lurah Kelurahan Kapuk	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	108.460.583	106.920.750	1.539.833	Efisiensi
34	Rehab Total Rumah Dinas Lurah Kelurahan Kapuk	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	1.158.961.493	838.708.000	320.253.493	Efisiensi
35	Pembayaran Listrik	Belanja Tagihan Listrik	10.534.866.240	8.562.057.855	1.972.808.385	Efisiensi
36	Pembayaran Air	Belanja Tagihan Air	1.341.120.000	957.335.853	383.784.147	Efisiensi
37	Pembayaran Telepon	Belanja Tagihan Telepon	124.800.000	78.773.430	46.026.570	Efisiensi
38	Pembayaran Lisensi Meeting Online	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	47.972.007	47.389.000	583.007	Efisiensi
39	Pembayaran Gaji PJLP Keamanan Kantor	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	6.379.207.400	6.346.883.713	32.323.687	Efisiensi
40	Penyediaan Pakaian Kerja PJLP Keamanan Kantor	Belanja Pakaian Teknik	138.821.100	133.977.000	4.844.100	Efisiensi
41	Penyediaan Pembayaran Sewa Mesin Foto Copy	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	253.440.000	213.847.092	39.592.908	Efisiensi
42	Rehab Sedang Kantor Lurah Duri Kosambi	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	24.455.013	24.075.900	379.113	Lainnya
43	Rehab Sedang Kantor Lurah Duri Kosambi	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	151.661.697	150.294.000	1.367.697	Lainnya
44	Rehab Sedang Kantor Lurah Duri Kosambi	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	6.576.153.166	4.961.644.773	1.614.508.393	Lainnya
45	Rehab Berat Kantor Camat Kecamatan Taman Sari	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	24.455.013	0	24.455.013	Lainnya

46	Rehab Berat Kantor Camat Kecamatan Taman Sari	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	151.661.697	103.664.565	47.997.132	Lainnya
47	Rehab Berat Kantor Camat Kecamatan Taman Sari	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	11.008.514.856	6.207.110.550	4.801.404.306	Lainnya
48	Pembayaran Gaji PJLP Kebersihan Kantor	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	8.292.969.620	8.222.687.896	70.281.724	Efisiensi
49	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Walikota Jakarta Barat	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	71.333.383	68.300.000	3.033.383	Efisiensi
50	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Walikota Jakarta Barat	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	45.459.469	44.644.200	815.269	Efisiensi
51	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Walikota Jakarta Barat	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.429.172.048	551.496.460	877.675.588	Efisiensi
52	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Walikota Jakarta Barat	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	83.921.750	81.972.591	1.949.159	Efisiensi
53	Pengendalian Hama Gedung Kompleks Kantor Walikota Jakarta Barat	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	45.407.880	44.400.000	1.007.880	Efisiensi
54	Pemeliharaan Instalasi ME Kantor Walikota Kota	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	18.700.000	18.204.000	496.000	Efisiensi
55	Pemeliharaan Instalasi ME Kantor Walikota Kota	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	87.912.000	0	87.912.000	Efisiensi
56	Pemeliharaan Instalasi ME Kantor Walikota Kota	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	277.176.799	246.457.185	30.719.614	Efisiensi

57	Pemeliharaan Instalasi ME Kantor Walikota Kota	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	196.884.600	191.508.300	5.376.300	Efisiensi
58	Penyediaan Pakaian Kerja PJLP Kebersihan Kantor	Belanja Pakaian Teknik	187.511.610	166.666.500	20.845.110	Efisiensi
59	Penyediaan Barang Pakai Habis Kebersihan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	164.814.694	146.417.991	18.396.703	Efisiensi
60	Penyediaan Perlengkapan Kerja PJLP Kebersihan Kantor	Belanja Modal Alat Pembersih	51.451.180	44.070.500	7.380.680	Efisiensi
61	Penyediaan Jasa Pembuangan Sampah	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	81.145.440	62.444.160	18.701.280	Efisiensi
62	Pemeliharaan AC Kantor Walikota Jakarta Barat	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	3.331.007.075	3.286.676.687	44.330.388	Efisiensi
63	Pemeliharaan Lift Kantor Walikota Jakarta Barat	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	1.481.004.064	557.807.967	923.196.097	Gagal Lelang
64	Pemeliharaan Mesin Genset Kantor Walikota Jakarta Barat	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	43.851.571	42.624.000	1.227.571	Efisiensi
65	Pemeliharaan Mesin Genset Kantor Walikota Jakarta Barat	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	128.863.845	113.775.000	15.088.845	Efisiensi
66	Pembayaran Gaji PJLP Taman	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	765.504.888	750.005.526	15.499.362	Efisiensi
67	Penyediaan Pakaian Kerja PJLP Taman	Belanja Pakaian Teknik	13.146.012	13.040.280	105.732	Efisiensi
68	Penyediaan Perlengkapan Kerja PJLP Taman	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	40.279.305	37.365.375	2.913.930	Efisiensi
69	Pembayaran Gaji PJLP ME Kantor	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	1.722.385.998	1.712.156.269	10.229.729	Efisiensi
70	Penyediaan Perlengkapan Kerja PJLP ME Kantor	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	18.482.288	17.868.558	613.730	Efisiensi

71	Penyediaan Perlengkapan Kerja PJLP ME Kantor	Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	41.565.692	40.848.000	717.692	Efisiensi
72	Penyediaan Perlengkapan Kerja PJLP ME Kantor	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	10.865.910	10.604.718	261.192	Efisiensi
73	Penyediaan Perlengkapan Kerja PJLP ME Kantor	Belanja Modal Perkakas Khusus (Special Tools)	1.808.400	1.792.150	16.250	Efisiensi
74	Penyediaan Perlengkapan Kerja PJLP ME Kantor	Belanja Modal Alat Pendingin	13.732.840	13.320.000	412.840	Efisiensi
75	Penyediaan Pakaian Kerja PJLP ME Kantor	Belanja Pakaian Teknik	38.944.719	37.582.380	1.362.339	Efisiensi
76	Penyediaan Alat Listrik Kantor Walikota	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	170.674.515	150.000.000	20.674.515	Efisiensi
77	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	17.109.400	16.150.500	958.900	Efisiensi
78	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	48.465.835	44.336.397	4.129.438	Efisiensi
79	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	8.098.200	7.992.000	106.200	Efisiensi
80	Pengisian Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	150.615.300	134.842.800	15.772.500	Efisiensi
81	Penyediaan Jasa Perizinan KDO Kota Administrasi Jakarta Barat	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	23.558.500	18.149.700	5.408.800	Efisiensi
82	Penyediaan BBM KDO Kota Administrasi Jakarta Barat	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	377.266.560	360.000.000	17.266.560	Efisiensi
83	Pemeliharaan KDO Kota Administrasi Jakarta Barat	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	152.401.112	134.569.082	17.832.030	Efisiensi
84	Pemeliharaan KDO Kota Administrasi Jakarta Barat	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	54.671.934	45.360.751	9.311.183	Efisiensi

85	Pemeliharaan KDO Kota Administrasi Jakarta Barat	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.710.885	1.109.943	600.942	Efisiensi
86	Pemeliharaan KDO Kota Administrasi Jakarta Barat	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	2.416.480	2.170.050	246.430	Efisiensi
87	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi dan Pengendalian dan Evaluasi Renstra Perangkat Daerah	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.286.592	2.163.200	123.392	Efisiensi
88	Pelaksanaan Rapat Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Tingkat Kota Administrasi	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	519.680	512.000	7.680	Efisiensi
89	Sekretariat Anggota Dewan Kota/Kabupaten	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.561.600	6.519.030	42.570	Lainnya
90	Sekretariat Anggota Dewan Kota/Kabupaten	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	30.628.290	30.311.880	316.410	Lainnya
91	Sekretariat Anggota Dewan Kota/Kabupaten	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.381.225	4.373.400	7.825	Lainnya
92	Sekretariat Anggota Dewan Kota/Kabupaten	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	40.949.040	40.948.344	696	Lainnya
93	Sekretariat Anggota Dewan Kota/Kabupaten	Belanja Pakaian Olahraga	2.916.320	2.916.192	128	Lainnya
94	Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi Jakarta Barat	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	280.747.500	260.532.200	20.215.300	Efisiensi
95	Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi Jakarta Barat	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	87.381.250	74.140.000	13.241.250	Efisiensi
96	Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi Jakarta Barat	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	51.186.300	49.950.000	1.236.300	Efisiensi
97	Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi Jakarta Barat	Belanja Jasa Tenaga Ahli	6.160.000	3.520.000	2.640.000	Lainnya

98	Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi Jakarta Barat	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	173.820.680	158.532.160	15.288.520	Efisiensi
99	Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi Jakarta Barat	Belanja Sewa Peralatan Umum	25.122.900	16.570.000	8.552.900	Lainnya
100	Penyelenggaraan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi Jakarta Barat	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	585.000.000	578.585.000	6.415.000	Efisiensi
101	Pelaksanaan Rapat Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	4.000.000	3.829.500	170.500	Efisiensi
102	Pelaksanaan Rapat Penagihan Kewajiban Fasos Fasum dan Sinkronisasi Data SIPPT Kota Administrasi	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	42.900.000	42.884.000	16.000	Efisiensi
103	Pembayaran Iuran Keanggotaan Kota Administrasi Dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)	Belanja Registrasi/Keanggotaan	57.029.500	55.000.000	2.029.500	Efisiensi
104	Belanja Penyediaan Jasa Pengurusan Perkara Hukum	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	63.090.000	2.570.000	60.520.000	Lainnya

Prestasi / Penghargaan

Sejalan dengan situasi darurat kesehatan masyarakat akibat wabah yang disebabkan oleh virus corona atau pandemi Covid-19, berbagai penilaian atau perlombaan yang diselenggarakan pada tahun-tahun sebelumnya baik tingkat nasional maupun pada tingkat provinsi sebagian besar tidak dilaksanakan pada tahun 2022. Pelaksanaan Inovasi, keberlanjutan dan kolaborasi dilakukan oleh jajaran Pemerintah Kota Administra Jakarta Barat dengan mengajak stakeholder.

Bersama jajaran menjadi kolaborator pada setiap aksi kolaborasi pada setiap pelaksanaan kegiatan di seluruh wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat. Terdapat prestasi atau penghargaan yang berhasil diraih Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai salah satu bukti nyata dari upaya yang dilakukan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada level Nasional, Pemerintah Provinsi, dan antar wilayah Kota Administrasi.





BAB **4** Penutup

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 nilai capaian kinerja Kota Administrasi Jakarta Barat pada tahun 2022 adalah sebesar 102,18% dengan kenaikan dibandingkan tahun 2021. Dukungan pada Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2022 sebanyak 7 KSD Tahun 2022 dengan pelaksanaan Rencana Aksi sebanyak 28 Renaksi dengan capaian 100 %. Terdapat Sasaran Khusus dan Operasional pada pelaksanaan perjanjian Kinerja Tahun 2022. Adapun pada Tahun 2022 capaian rata-rata Sasaran Khusus sebesar 103,6 % dan Sasaran Operasional sebesar 100,1 %.

Kenaikan ini merupakan hasil kerja bersama jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta didukung penerapan Nilai-nilai Budaya Kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadikan Kota Administrasi Jakarta Barat Terbaik. Komitmen pelayanan kepada masyarakat dan penanganan Pandemi Covid 19 berdampak pada penyesuaian realisasi penggunaan anggaran dan pembatasan mobilitas melalui kegiatan PPKM dan kegiatan lainnya. Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai jbaran dari visi,

misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol serta partisipasi kolaborasi dari masyarakat Kota Jakarta Barat. .



LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2022

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

Nama : Yani Wahyu Purwoko
 NIP : 197302241962111001
 Jabatan : Walikota
 Unit Kerja : Kota Administrasi Jakarta Barat

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
Sasaran Strategis											
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	1	Indeks Reformasi Birokrasi	e-SAKIP	<p>Dasar Hukum: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi</p> <p>Definisi: Indeks Reformasi Birokrasi adalah nilai akhir dari serangkaian kegiatan evaluasi atau penilaian 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi, yaitu: a. Manajemen Perubahan b. Penguatan pengawasan c. Penguatan akuntabilitas d. Perubahan Organisasi e. Perubahan tatakelola f. Perubahan manajemen SDM g. Deregulasi Kebijakan h. Peningkatan kualitas pelayanan publik.</p> <p>Metode Pengukuran: Indeks Reformasi Birokrasi = Aspek Penguatan (80%) + Aspek Hasil (40 %) Aspek Penguatan (80%) = Aspek Pemenuhan (20%) + Aspek Hasil Antara (10%) + Aspek Reform (50%) Aspek Hasil (40%) = Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan (10%) + Kualitas Pelayanan Publik (10%) + Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN (10%) + Kinerja Organisasi (10%)</p> <p>Sumber Data: Adapun penilaian Indeks Reformasi Birokrasi dilakukan oleh Kementerian PAN-RB.</p>	NA	NA	NA	91	91	Nilai
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Kota Administrasi Jakarta Barat	1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan (termasuk di kelurahan)	e-SAKIP	<p>Dasar Hukum: Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <p>Definisi: Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan (termasuk di kecamatan dan kelurahan) merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun unsur layanan yang di survey diantaranya Kegiatan Penyelenggaraan Pembudayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK, Penyelenggaraan Kegiatan Pengabdian Masyarakat Daerah Berbasis Dampak (DDB) dan Chikungunya Melalui Pengobatan Juru Pemantau Jentik (Jumantik), Pelaksanaan Peta Pelayanan Terpadu (Poyetpadu), PPSU, RPTRA, dan Penyelenggaraan Kelurahan Umum, serta kepuasan terhadap pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM).</p> <p>Metode Pengukuran: Metode pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, dimana masyarakat melakukan penilaian kepuasan terhadap layanan dalam rentang angka skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dengan rentang penilaian persepsi sebagai berikut: a. Nilai Persepsi 1, dengan nilai interval KM sebesar 1,00 – 2,50, atau nilai interval konversi 25,00 – 54,99; b. Nilai Persepsi 2, dengan nilai interval KM sebesar 2,50 – 3,00, atau nilai interval konversi 55,00 – 76,50; c. Nilai Persepsi 3, dengan nilai interval KM sebesar 3,07 – 3,53, atau nilai interval konversi 76,61 – 88,50; d. Nilai Persepsi 4, dengan nilai interval KM sebesar 3,54 – 4,00, atau nilai interval konversi 88,61 – 100,00.</p> <p>Hasil diperoleh dengan cara survei indeks kepuasan masyarakat di tingkat Kelurahan. Kemudian hasil capaian seluruh Kelurahan menjadi agregasi capaian Kecamatan dan kemudian agregasi kecamatan menjadi capaian Walikota, dengan responden survei adalah masyarakat dan kader minimal 100 orang per pelayanan.</p> <p>Sumber Data: Hasil pelaksanaan survei kepuasan ke masyarakat</p>	NA	NA	NA	88,5	88,5	Nilai

3	Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran	1	Penertiban kualitas pelaksanaan anggaran	e-SAKIP	<p>Definisi: Penertiban Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilakukan dengan mengukur 3 Komponen pada subkegiatan di bawah Program Peningkat Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yaitu:</p> <p>a. Penyempitan Anggaran. Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan di lingkungan Peningkat Daerah. Nilai penyempitan anggaran maksimal adalah 40%. Penyempitan anggaran bernilai 40% apabila selisih anggaran > 50%. Apabila selisih anggaran di bawah < 50% maka perhitungan nilai penyempitan anggaran = (Persentase Selisih Anggaran x 40%). Anggaran yang diperhitungkan meliputi APBD dan BLU, dan tidak termasuk dana transfer dari pemerintah pusat.</p> <p>b. Efisiensi adalah sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari subkegiatan yang target sewajarnya telah dicapai. Apabila pencapaian output tidak tercapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. Sisa dana adalah selisih lebih pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak dialihkan kembali untuk subkegiatan/kegiatan lainnya.</p> <p>c. Pencapaian output adalah persentase capaian indikator kinerja subkegiatan (output). Realisasi pencapaian output dapat dilihat dalam aplikasi e-monev Anggaran hasil inputan POUKPD.</p> <p>Metode Pengukuran: 1. Selisih Anggaran < 20% dan output < 100% Realisasi = (40%) + ((NilaiSelisih X 10%)/20%) + (50%) 2. Selisih Anggaran < 50% dan output <= 100% Realisasi = (Penyempitan Anggaran X 40%) + (pencapaian output X 50%) 3. Selisih Anggaran < 20%, namun output <= 100% Realisasi = (40%) + (pencapaian output x 50%)</p> <p>Sumber Data: Sistem informasi dan eSAKIP (dialek)</p>	N/A	N/A	N/A	91%	91%	Penan
4	Meningkatnya tingkat dan pengendalian infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi	1	Penertiban penyelesaian rencana aksi Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Wehuk Sial Embung, Realisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai Nomor (2)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Wehuk Sial Embung, Realisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai Nomor (2)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
5	Meningkatnya kewasusahan baru	1	Penertiban penyelesaian rencana aksi Program Pembiayaan dan Pengembangan Kewasusahan Terpadu Nomor (2)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Program Pembiayaan dan Pengembangan Kewasusahan Terpadu Nomor (2)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
6	Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berbudaya, serta memiliki prasarana pendukungnya	1	Penertiban penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat Nomor (4)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat Nomor (4)	100%	N/A	100%	N/A	100%	Persentase
7	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	1	Penertiban penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian Nomor (7)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian Nomor (7)	100%	100%	N/A	N/A	100%	Persentase
8	Terwujudnya tata kota pemerintahan dan kawasan Daerah yang terapan dan akuntabel	1	Penertiban penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA Nomor (3)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA Nomor (3)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
		2	Penertiban penyelesaian rencana aksi Penguatan Peran Walikota/Sipal dalam Perataan Kawasan Nomor (8)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penguatan Peran Walikota/Sipal dalam Perataan Kawasan Nomor (8)	N/A	100%	100%	100%	100%	Persentase
		3	Penertiban penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan Nomor (9)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan Nomor (9)	N/A	100%	N/A	100%	100%	Persentase

Sasaran Operasional

16	Terseminalnya Tindak Lanjut Asahan Gubernur	1	Penertiban capaian penyelesaian Tindak Lanjut Asahan Gubernur	e-Kinerja	Jumlah Realisasi TL Asahan Gubernur (lapin, e-office, ashan melalui media elektronik, dan bentuk ashan lainnya) dibagi Jumlah TL Asahan Gubernur dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Penan
17	Meningkatnya penyelesaian pengadilan masyarakat	1	Penertiban capaian penyelesaian pengadilan masyarakat	CRM	Jumlah Realisasi TL Adan Masyarakat dibagi Jumlah TL Adan Masyarakat di kali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Penan
18	Terseminalnya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (SPK)	1	Penertiban progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (SPK)	e-Kinerja	(50% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI tahun 2020 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Peningkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2020 dan seterusnya) x 100% (Efektifitas oleh inspektorat)	25%	25%	25%	25%	100%	Penan

Gubernur Daerah Khusus Ibukota

Jakarta, Februari 2022
Wakil Kota Administrasi Jakarta Barat,

REALISASI INDIKATOR KINERJA TAHUN 2022

TINGKAT ESELON II

Tujuan / Sasaran	Indikator tujuan		SATUAN	Kinerja			Evaluasi Capaian	Unit Penanggung jawab di Kota Adm. Jakarta Barat	Lokasi
		Indikator sasaran		Target	Realisasi	Capaian			
Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat untuk menciptakan Jakarta sebagai kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban dan kesejahteraan bagi semua	1	indeks kepuasan masyarakat	Indeks	88,50	93,59	105,75%	Indikator kinerja tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Unjuk kerja, kesungguhan, komitmen, inovasi, kreatifitas serta dan kapasitas dari seluruh pegawai termasuk koordinasi dan kerja sama yang baik dengan unit/instansi terkait perlu dipertahankan dan ditingkatkan	1. Walikota 2. Wakil Walikota 3. Sekretaris Kota	Jakarta Barat
1 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Kota Administrasi Jakarta Barat	1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan (termasuk di kelurahan)	Indeks	88,50	93,59	105,75%	Hasil pelaksanaan penyelenggaraan Kualitas pelayanan publik dilaksanakan oleh para Camat/Lurah dan kebijakan tingkat provinsi sesuai hasil rapat pada Biro ORB, survei kepuasan masyarakat tahun 2022 dilaksanakan melalui platform dan sesuai dengan target sasaran		
2 Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Persentase	91,00	89,74	98,62%	Sebagian besar kegiatan terdapat perubahan anggaran dan pelaksanaan yang efektif dan sesuai, namun demikian tetap dilaksanakan tanpa anggaran dalam bentuk pengoordinasian, konsultasi, pemantauan dan evaluasi melalui media elektronik		
3 Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat untuk menciptakan Jakarta sebagai kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban dan kesejahteraan bagi semua.	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	91,00	n/a	100,00%	Tidak Tersedia nilai dan tidak adanya anggaran		

Faktor Pendorong :

- Dukungan masyarakat, kinerja dari para Camat/Lurah serta koordinasi dan kerja sama yang baik dari unit/instansi terkait dan penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan survei

- Komitmen dan kinerja dari seluruh perangkat serta koordinasi dan kerja sama yang baik dari unit/instansi terkait

Faktor Penghambat :

Tingkat Eselon III

program prioritas pembangunan	INDIKATOR PROGAM (OUTCOME), INSTITUSI PEMERINTAHAN (IP)		SATUAN	Kinerja			Anggaran			Evaluasi Capaian	Unit Penanggung jawab di Kota Adm. Jakarta Barat
	Indikator Kinerja			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
Indikator Kinerja Setara Program											
	1	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang Pemerintahan	Indeks	88,5	94,27	105,17%	-	-	-	Nilai IKM Bidang Ketertiban Umum	Asisten Pemerintahan
	2	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang Perekonomian dan Pembangunan	Indeks	88,5	93,51	105,67%	-	-	-	Nilai IKM Bidang PPSU	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
	3	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang Kesejahteraan Rakyat	Indeks	88,5	92,99	105,37%	-	-	-	Nilai IKM Bidang Jumantik, PKK, Posyandu, RPTRA	Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							375.956.239.661	356.038.629.179	94,70%	Rata-rata pelaksanaan program pada 94,70 % pada Indeks kepuasan Layanan Kantor Faktor Pendorong : Pelaksanaan pemberian layanan terbaik pada masyarakat Kota Administrasi Jakarta Barat Faktor Penghambat : Pergeseran anggaran dan kondisi pandemi Covid-19	1) Kabag Umum 2) Camat, Wakil Camat Sekretaris Kecamatan 3) Lurah
PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN							512.932.993.906	506.330.341.622	98,71%	Rata-rata pelaksanaan program pada 98,71 % pada Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dan Kecamatan Faktor Pendorong : Komitmen dan kinerja didukung koordinasi dan kerja sama yang baik dari unit kerja terkait peningkatan kinerja Kelurahan dan Kecamatan Faktor Penghambat : Pembatasan social kemasyarakatan, target capaian penegakan hukum dan vaksinasi	1) Camat 2),Lurah
PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI							13.740.812.391	10.783.125.952	78,48%	Rata-rata pelaksanaan program pada 78,48 % pada Persentase Capaian Penyelenggaraan indikator Program	1) Para Kabag Setko Kota Adm.Jakarta Barat 2) Camat

program prioritas pembangunan	INDIKATOR PROGAM (OUTCOME), INSTITUSI PEMERINTAHAN (IP)		SATUAN	Kinerja			Anggaran			Evaluasi Capaian	Unit Penanggung jawab di Kota Adm. Jakarta Barat
	Indikator Kinerja			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
										<p>Faktor Pendorong : Komitmen dan kinerja mencapai realisasi kinerja 100 %, Kolaborasi, dan penanganan Kinerja tugas dan fungsi</p> <p>Faktor Penghambat : Pergeseran anggaran, kondisi paska Pandemi Covid 19, tidak terselenggaranya kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia karena kegiatan ditiadakan. Adanya kegiatan tidak bisa dilaksanakan</p>	3) Lurah
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						0	0	100%	<p>Rata-rata pelaksanaan program pada 100 % pada Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik pada Kelurahan dan Kecamatan</p> <p>Faktor Pendorong : Komitmen dan kinerja mencapai realisasi kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan didukung Reformasi Birokrasi dengan tidak adanya anggaran</p> <p>Faktor Penghambat : Penanganan paska kondisi Pandemi Covid 19, penambahan tugas dan fungsi seperti target penanganan jenazah Covid 19 < 6 jam dan Capaian Vaksinasi diatas 80 persen</p>	1) Camat 2),Lurah	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						70.475.724.657	64.230.734.202	91,14%	<p>Rata-rata pelaksanaan program pada 91,14 % pada Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Kelurahan, Kecamatan dan Kota/Kabupaten Administrasi pada Kelurahan dan Kecamatan</p> <p>Faktor Pendorong : Komitmen dan kinerja mencapai realisasi kinerja Penyelenggaraan</p>	1) Camat 2),Lurah	

program prioritas pembangunan	INDIKATOR PROGAM (OUTCOME), INSTITUSI PEMERINTAHAN (IP)		SATUAN	Kinerja			Anggaran			Evaluasi Capaian	Unit Penanggung jawab di Kota Adm. Jakarta Barat
	Indikator Kinerja			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
										<p>Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan pelaksanaan Budaya Organisasi Pemprov DKI Jakarta</p> <p>Faktor Penghambat : Penanganan paska kondisi Pandemi Covid 19, kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi pada pelaksanaan kebersihan dan ketertiban umum.</p>	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						2.788.038.904	2.402.475.995	86,17%	<p>Rata-rata pelaksanaan program pada 86,17 % pada Indeks Kepuasan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah Kelurahan dan Kecamatan</p> <p>Faktor Pendorong : Komitmen dan kinerja mencapai realisasi kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan memberikan layanan terbaik pada masyarakat Kota Administrasi Jakarta Barat dengan cepat menangani pengaduan pada seluruh kanal pengaduan Pemprov DKI Jakarta</p> <p>Faktor Penghambat : Penanganan, kondisi Pandemi Covid 19, laporan pengaduan yang perlu di Tindak lanjuti pada Tahun berjalan kedepannya.</p>	1) Camat 2) Lurah	

LAPORAN PENILAIAN SAKIP DAN IRB PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2022



BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
 Dari : Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
 Nomor : e-0109/OT.08
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Hal : Laporan Penilaian SAKIP dan RB Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Sehubungan dengan target sasaran strategis Perjanjian Kinerja Tahun 2022 terkait dengan nilai capaian SAKIP dan IRB Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022, dengan ini Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi melaporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

- a. Dasar hukum penilaian SAKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- b. Beberapa komponen yang dinilai dalam penilaian SAKIP, yaitu:
 - 1) Perencanaan Kinerja (30%)
 - 2) Pengukuran Kinerja (25%)
 - 3) Pelaporan Kinerja (15%)
 - 4) Evaluasi Internal (10%)
 - 5) Capaian Kinerja (20%)
- c. Capaian nilai SAKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 yaitu mendapat nilai 80,01 atau Predikat "A". Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menunjukkan hasil yang sangat baik, berikut data rinci:

No	Komponen	Bobot	Realisasi	
			2021	2022
1	Perencanaan Kinerja	30	25,72	KemenPAN dan RB Belum menyampaikan Hasil Evaluasi
2	Pengukuran Kinerja	25	20,67	
3	Pelaporan Kinerja	15	11,98	
4	Evaluasi Internal	10	7,93	
5	Capaian Kinerja	20	13,8	
	Nilai Hasil Evaluasi	100	80,10	
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A	

- d. Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 masih belum disampaikan oleh KemenPAN dan RB sehingga belum dapat disajikan data capaian SAKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022.

2. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)

- a. Dasar hukum Kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) tahun 2022 adalah:
- 1) Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024
 - 2) Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
 - 3) Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menteri PANRB Nomor B/95/M.RB.06/2021, hal hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020
 - 4) Surat Kementerian PANRB Nomor B/524/RB.06/2021, hal Mekanisme Penyampaian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tahun 2021
- b. Beberapa komponen penilaian capaian IRB :
- 1) Komponen Pengungkit
 - Pemuhan (20%)
 - Hasil Antara Area Perubahan (10%)
 - Reform (10%)
 - 2) Komponen Hasil
 - Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan (10%)
 - Kualitas Pelayanan Publik (10%)
 - Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN (10%)
 - Kinerja Organisasi (10%)
- c. Berdasarkan dengan evaluasi yang telah dilaksanakan, simpulan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:
- 1) Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 adalah 78,88 dengan kategori "BB". Rincian hasil evaluasi sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Realisasi	
			2021	2022
A	Komponen Pengungkit			
I	Pemuhan	20,00	14,30	KemenPAN dan RB Belum menyampaikan Hasil Evaluasi
II	Hasil Antara Area Perubahan	10,00	6,31	
III	Reform	30,00	23,99	
	Total Komponen Pengungkit	60,00	44,60	
B	Komponen Hasil			
I	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	8,21	
II	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,62	
III	Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,35	
IV	Kinerja Organisasi	10,00	9,11	
	Total Komponen Hasil	40,00	34,28	
	Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)	100,00	78,88	

- 2) Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 masih belum disampaikan oleh KemenPAN dan RB sehingga belum dapat disajikan data capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022.

Demikian yang dapat saya sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak, saya ucapkan terimakasih.

Jakarta, 28 Desember 2022
Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
Setda Provinsi DKI Jakarta,












Bayu Meghantara
NIP 197205201991011001


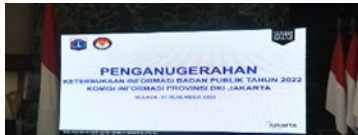


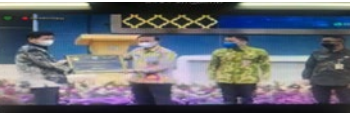

Tembusan :

1. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta
5. Plt. Kepala Diskominfo Provinsi DKI Jakarta

**PRESTASI DAN PENGHARGAAN YANG DIRAIH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
TAHUN 2022**

Unit Kerja Terkait	Prestasi	Tingkat	Unit/ Organisasi Yang Mengeluarkan Penghargaan	Keterangan	Dokumentasi	
Bagian Kesejahteraan Rakyat	1	Juara II Lomba Binaul Masjid	Provinsi DKI Jakarta	Biro Dikmental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta dan Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi DKI Jakarta	Masjid As Salam Kel. Joglo	
	2	Juara III Lomba Majelis Ta'lim	Provinsi DKI Jakarta	Biro Dikmental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta & Forum Komunikasi Majelis Ta'lim (FKMT) Provinsi DKI Jakarta	Majelis Ta'lim At Tahriah Kelurahan Pegadungan	
	3	Juara I (Umum) STQH ke 27 Tahun 2022	Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta & LPTQ Provinsi DKI Jakarta	Kota Adm Jakarta Barat Juara Umum STQH XXVII tahun 2022 tingkat Provinsi DKI Jakarta, dari 16 kategori lomba, kafilah Jakarta Barat mrdominasi raihan prestasi dengan menyabet di 10 golongan dari 4 cabang yang dilombakan	

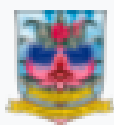
4	Juara 2 terbaik capaian pelayanan KB jangka panjang tingkat nasional	Nasional	BKKBN	Penghargaan Pelayanan Keluarga Berencana TNI Manunggal Bangsa Kencana-Kesehatan Terpadu Kolaborasi BKKBN dan TNI dalam rangka percepatan penurunan stunting tahun 2022	 <table border="1" data-bbox="1230 501 1549 663"> <caption>13. Jumlah Capaian Pelayanan KB Metode Kontrasel Jangka Panjang</caption> <thead> <tr> <th>KELOMPOK PROVINSI</th> <th>JUARA</th> <th>KAB/KOTA</th> <th>PROVINSI</th> <th>KODUM</th> <th>KOREM</th> <th>CAPAIAN TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Regional I (Target = 10.000 x 4 = 75.000)</td> <td>1</td> <td>Kab. Garut</td> <td>Jawa Barat</td> <td>0611/Garut</td> <td>062/Tanah raya</td> <td>18.363</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Kota Depok</td> <td>Jawa Barat</td> <td>0608/Depok</td> <td>051/Wisnubata</td> <td>9.817</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Regional II (Target = 4.000 x 4 = 16.000)</td> <td>1</td> <td>Kab. Bandung</td> <td>Jawa Barat</td> <td>0624/Kabupaten Bandung</td> <td>062/Tanah raya</td> <td>8.375</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Kab. Bojonegara</td> <td>Jawa Timur</td> <td>0813/Bojonegara</td> <td>082/Citra Paniah Purba Jaya</td> <td>14.523</td> </tr> <tr> <td rowspan="2"></td> <td>1</td> <td>Jakarta Barat</td> <td>DKI Jakarta</td> <td>0602/Jakarta Barat</td> <td>052/Wispek nam</td> <td>2.498</td> </tr> </tbody> </table>	KELOMPOK PROVINSI	JUARA	KAB/KOTA	PROVINSI	KODUM	KOREM	CAPAIAN TOTAL	Regional I (Target = 10.000 x 4 = 75.000)	1	Kab. Garut	Jawa Barat	0611/Garut	062/Tanah raya	18.363	2	Kota Depok	Jawa Barat	0608/Depok	051/Wisnubata	9.817	Regional II (Target = 4.000 x 4 = 16.000)	1	Kab. Bandung	Jawa Barat	0624/Kabupaten Bandung	062/Tanah raya	8.375	2	Kab. Bojonegara	Jawa Timur	0813/Bojonegara	082/Citra Paniah Purba Jaya	14.523		1	Jakarta Barat	DKI Jakarta	0602/Jakarta Barat	052/Wispek nam	2.498
KELOMPOK PROVINSI	JUARA	KAB/KOTA	PROVINSI	KODUM	KOREM	CAPAIAN TOTAL																																							
Regional I (Target = 10.000 x 4 = 75.000)	1	Kab. Garut	Jawa Barat	0611/Garut	062/Tanah raya	18.363																																							
	2	Kota Depok	Jawa Barat	0608/Depok	051/Wisnubata	9.817																																							
Regional II (Target = 4.000 x 4 = 16.000)	1	Kab. Bandung	Jawa Barat	0624/Kabupaten Bandung	062/Tanah raya	8.375																																							
	2	Kab. Bojonegara	Jawa Timur	0813/Bojonegara	082/Citra Paniah Purba Jaya	14.523																																							
	1	Jakarta Barat	DKI Jakarta	0602/Jakarta Barat	052/Wispek nam	2.498																																							
	5	Juara 2 Duta GenRe Pria Tingkat Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	Dinas PPAPP	Juara 2 penilaian Duta GenRe pada kegiatan Apresiasi Duta GenRe dan Jambore Ajang Kreatifitas Tahun 2022	  																																							
6	Penghargaan Nindya Kota Layak Anak Tingkat Nasional	Nasional	Kementerian PPA																																										
7	Penghargaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kemenpan RB untuk Puskesmas Kebon Jeruk	Nasional	Kemenpan RB																																										

	8	Nominasi Anugerah KPAl Kategori SIMEP Perlindungan Anak Tahun 2022	Nasional	Komisi Perlindungan Anak Indonesia	Nominasi Pemerintah Daerah yang memiliki Komitmen terhadap Perlindungan Anak dan Pelaporan berbasis sistem Informasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (SIMEP) Perlindungan Anak	
Bagian Umum dan Protokol	9	Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022	Prov.DKI Jakarta	Komisi Informasi Publik Prov.DKI Jakarta	Sebagai Badan Publik Terbaik dari Kategori Pemerintah Kota/Kab Administrasi	 
	10	Penghargaan Pengelola dan Merawat Arsip Tahun 2022	Prov.DKI Jakarta	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. DKI Jakarta	Penghargaan Pengelola dan Merawat Arsip Kategori Memuaskan pada Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2022	 
Bagian Hukum	11	Kota Peduli Hak Asasi Manusia	Nasional	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	Nilai 87,3	

Kecamatan Palmerah	12	Badan Publik Terbaik II Kategori Kecamatan	Prov.DKI Jakarta	Komisi Informasi Publik Prov.DKI Jakarta	Badan Publik Terbaik II Kategori Kecamatan dalam "Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022"	
Kelurahan Kedoya Utara	13	Pekan Olah Raga Rakyat (Balap Karung)	Prov.DKI Jakarta	Dispora		



Jakarta
Sukses Jakarta untuk Indonesia!



JAKARTA BARAT

